

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENANGANAN  
KELUARGA PRA SEJAHTERA  
DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**VIRA MUFARIDA  
NIM : D20182023**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
NOVEMBER 2023**

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENANGANAN  
KELUARGA PRA SEJAHTERA  
DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**Vira Mufarida**  
NIM : D20182023

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
NOVEMBER 2023**

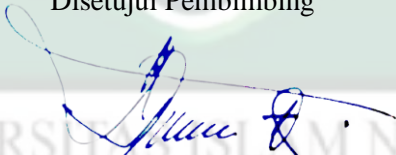
**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENANGANAN  
KELUARGA PRA SEJAHTERA  
DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:  
**Vira Mufarida**  
NIM : D20182023

Disetujui Pembimbing

  
**Dr. Imam Turmudi, S.Pd., M.M.**  
NIP.197111231997031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENANGANAN  
KELUARGA PRA SEJAHTERA  
DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Hari : Rabu  
Tanggal : 22 November 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Muhammad Muhib Alwi, MA  
NIP. 197807192009121005

  
Zayyinah Haririn, M.Pd.I  
NIP. 201603115

Anggota :

1. Muhibbin, M.Si (  )
2. Dr. Imam Turmudi, M.M. (  )

Menyetujui,  
Fakultas Dakwah



  
Dr. Fauzul Umam, M.Ag.  
NIP. 197302272000031001

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar Ra'd: 11)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Al-qur'an Al-Karim. Al-qur'an Terjemah, (Saudi:Khatim Al-Haramain, 2010)

## PERSEMBAHAN

Seiring ucapan syukur kepada Allah SWT dengan rasa tulus dan ikhlas dalam hati, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Keluarga saya Alm ayah (Alm Muhammad Joko), ibu (Vitria), Suami (Fandi Adi Setiawan) dan Adik (M. Khasiful Anwar) yang telah mendidik, memberikan kasih sayang, segala dukungan, serta senantiasa mendoakan kesuksesanku. Semoga engkau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rizki barokah, dan dijauhkan dari bala musibah. Teruntuk ayah Semoga diterima amal baiknya dan diampuni segala dosa-dosanya serta husnul khotimah. Aamiin.
2. Bapak Imam Turmuzi selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing dan mengayomi saya dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Teman-teman seperjuanganku Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2018 dan teman karib yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah menjadi keluarga keduaku selama di Jember dan ikut membantu memberikan dukungan, semangat serta doa dari awal kuliah sampai selesai.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi, dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman permusuhan menuju zaman yang penuh dengan nuansa persaudaraan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Pendidikan dalam Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Penanganan Keluarga Pra Sejahtera di Kabupaten Jember”.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah yang telah memberi izin untuk melaksanakan penelitian ini.
3. Bapak H. Zainul Fanani, M.Ag. selaku Koordinator Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah menerima judul skripsi ini.

4. Bapak Dr. Imam Turmudzi, S.Pd.,M.M selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan sepuh hati memberikan arahan, bimbingan dan motivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Dakwah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada kata yang dapat diucapkan selain doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas semua jasa yang telah diberikan kepada penulis. Skripsi ini pasti memiliki kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dalam penelitian selanjutnya bisa lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 14 Juni 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Penulis



## ABSTRAK

**Vira Mufarida, 2022:** *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Penanganan keluarga pra sejahtera di Kabupaten Jember.*

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah, pemberdayaan, keluarga pra sejahtera

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak yang kurang berjalan di karenakan salah satu faktor yang mengakibatkan masih tingginya jumlah kemiskinan adalah karakter sebagian warga kota Jember yang kurang baik yakni pengakuannya sebagai orang miskin, terutama ketika ada program dari pemerintah, sehingga tak jarang keluarga pra sejahtera yang membutuhkan bantuan tidak mendapatkan bagian dalam program.

Dalam penelitian fokus masalahnya adalah 1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan program pemberdayaan keluarga pra sejahtera?, 2. Bagaimana keterlibatan masyarakat pra sejahtera terhadap program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan keluarga pra sejahtera di Kota Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun jumlah informan dalam penelitian adalah 6 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, teknik pengabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Pemilihan informan berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan, dan informasi mengenai masalah penulis teliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam penanganan keluarga pra sejahtera yakni dengan peran regulator berupa pendataan valid mengenai masyarakat pra sejahtera dibantu oleh tenaga pembantu, peran dinamisator yakni dengan melakukan beberapa pelatihan khusus berupa seminar salah satunya yakni seminar pelatihan pembuatan abon ikan air tawar, sebagai fasilitator yakni dengan membiayai beberapa agenda pelatihan, implan gratis, dan penyaluran dan berupa uang dan sembako. 2) Keterlibatan keluarga pra sejahtera sangat bagus, mereka melaksanakan bimbingan yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan maksimal demi mengubah taraf hidup mereka.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34

C. Subyek Penelitian .....	35
D. Teknik pengumpulan data.....	36
E. Analisis Data.....	39
F. KeabsahanData .....	41
G. Tahap-tahap penelitian.....	42
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	44
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Juni tahun 2021, total masyarakat Indonesia ada 272.229.372 jiwa, yang mana 137,5 juta jiwa laki-laki serta 134,7 juta jiwa merupakan wanita. Dari jumlah penduduk tersebut ternyata dari BPS melaporkan, total masyarakat miskin pada tahun 2021 sebanyak 27,54 juta orang. Diprovinsi Jawa Timur berdasarkan data BPS jumlah penduduk sebanyak 40.665,696 beserta berdasarkan data BPS pada di tahun 2021 penduduk yang miskin diprovinsi Jawa Timur sebanyak 4,5 ribu jiwa. Sedangkan dikabupaten Jember sendiri berdasarkan BPS jumlah penduduk 2.536.729 jiwa serta dari BPS pada di tahun 2021 penduduk yang miskin mencapai 257,09 ribu jiwa. Sebagaimana yang sudah dikemukakan bahwasanya pembangunan nasional ialah usaha meningkatkan kualitas SDM di Indonesia secara berkelanjutan melalui penggunaan kemajuan pengetahuan serta teknologi dan mempertimbangkan perkembangan global. Pembangunan nasional juga bermaksud menciptakan masyarakat yang adil serta sejahtera dengan menyeluruh secara material atau spiritual dan melaksanakan perekonomian demi mensejahterahkan masyarakat. Berdasarkan pasal 34 UUD 1945 selaku dasar dalam menciptakan keadilan, kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat dengan peran serta keberpihakan negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Keluarga pra sejahtera ialah permasalahan pokok yang dialami oleh berbagai negara termasuk Indonesia, yang mana penyelesaiannya membutuhkan perlakuan secara sungguh-sungguh, kreatif serta memiliki kesinambungan. Masalah ini termasuk aspek pokok yang berlangsung serta berupaya diatasi di wilayah Kabupaten Jember. Sehingga pemerintah setempat yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) selaku perwakilan dari pemerintah kota memiliki fokus untuk membangun kesejahteraan sosial dan menyelesaikan permasalahan pada keluarga pra sejahtera. Salah satu faktor dari permasalahan keluarga pra sejahtera yakni melingkupi kemiskinan.<sup>1</sup>

Berbagai program yang diupayakan demi menuntaskan persoalan keluarga pra sejahtera, diantaranya ialah KUBE (Kelompok Usaha Bersama), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), dan program lainnya yang berusaha menekan dampak krisis ekonomi serta kemiskinan. Pada Tahun 2008, Pemerintah melalui Kemenko Kesra menetapkan rancangan program dalam menanggulangi kemiskinan yang terbagi dalam 3 kluster, yakni Bantuan dan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil. Didalam Al-Qur'an menjelaskan terkait pemberdayaan perempuan yakni:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٧﴾

---

<sup>1</sup> Observasi, 8 November 2023.

*Artinya: “Barang siapa yang berbuat amal saleh, baik laki-laki atau perempuan ketika beriman, maka sesungguhnya akan Kami beri untuknya kehidupan yang baik serta balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang sudah mereka kerjakan”. (Qs. An-Nahl :97)<sup>2</sup>*

Ayat tersebut memberi penjelasan bahwasanya laki-laki ataupun perempuan ialah sama dihadapan Allah SWT. Yang membedakannya hanyalah keimanan yang dimiliki. Tidak hanya laki-laki yang dapat menempuh karir, melainkan perempuan juga dapat memiliki peran secara aktif terkait aspek ekonomi walaupun secara umum perempuan juga menjadi ibu rumah tangga serta bergantung dengan penghasilan suami. Namun perempuan bisa menjalankan usaha berskala rumah tangga, industri kecil hingga industri besar demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya ataupun memberi lapangan pekerjaan secara produktif dan mandiri.

Pemberdayaan masyarakat desa memiliki arti tersendiri untuk meningkatkan penghasilan diantaranya terkait usaha masyarakat desa supaya bisa berperan utama untuk membangun ekonomi dan dapat memanfaatkan ketersediaan sumber daya dengan maksimal melalui kemampuan, kemauan serta mempergunakan potensi yang dimiliki.<sup>3</sup> Perekonomian masyarakat desa bergantung pada pemanfaatan lingkungan sekitarnya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ialah suatu aktivitas yang dilaksanakan agar memberdayakan masyarakat, terutama kelompok miskin, kelompok terpencil, kelompok marginal, kelompok pinggiran, menciptakan

---

<sup>2</sup> Al-qur'an Al-Karim. Al-qur'an Terjemah, (Saudi:Khatim Al-Haramain, 2010),403

<sup>3</sup> SitiNurjanah, Skripsi: “Strategi Pemanfaatan Lahan Kosong Untuk Taman Mahkota Dalam Meningkatkan Pendapatan Warga” (Lampung Utara: IAIN Metro, 2020), 1-2.

kesadaran, keinginan, serta kemampuan masyarakat untuk mengenali, menatasi, menjaga, serta menambah kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat ialah proses membangun masyarakat supaya memiliki inisiatif dalam mengawali aktivitas sosial demi memperbaiki keadaannya secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat berlangsung jika masyarakat tersebut ikut serta pada kegiatan yang memiliki tujuan untuk menambah kualitas sdm sesuai dengan kondisi serta karakteristik masyarakat itu sendiri. Di dalam al Quran dijelaskan tentang perlunya suatu perubahan, diantaranya dengan melakukan pemberdayaan. Sebagaimana dalam QS. Ar Ra'd ayat 11

لَهُرْ مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

*Artinya: "Baginya (manusia) ada malaikat yang senantiasa menjaga bergiliran, dari depan dan belakang. Mereka menjaga karena perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubahnya sendiri. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka tak ada yang bisa menolaknya dan tidak ada pelindung untuknya selain Dia."*

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahawa Allah tidak mengubah nasib kaumnya kecuali mereka yang mengubahnya sendiri. Artinya, sudah jelas bahwasanya manusia diharuskan agar berupaya serta berusaha untuk mengubah hidupnya. Pada konteks pemberdayaan, ayat ini mendorong manusia supaya senantiasa berusaha memperbaiki diri serta meningkatkan kesejahteraan. Sebab,

setiap komunitas berpotensi untuk diberdayakan seperti halnya firman Allah diatas<sup>4</sup>

Berikut ini kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan sosial yakni ; PP No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin; Permensos No. 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; PP No. 39 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan PP No. 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.

Kabupaten Jember termasuk kota dengan Angka kemiskinan yang tinggi dengan kasus keluarga pra sejahtera. Beragam upaya dilaksanakan pemerintah daerah demi mendukung usaha dalam menanggulangi kemiskinan melalui intervensi program gabungan antara lembaga pemerintah, swasta serta masyarakat. Kabupaten Jember melaksanakan program untuk menangani kemiskinan melalui beragam tahapan serta strategi yang sudah dibuat demi menekan masalah keluarga pra sejahtera di Kota Jember. Sehingga diperlukan bantuan untuk keluarga yang tidak mampu. Pemerintah Kabupaten Jember harus memberantasnya dengan cepat, pasalnya persoalan di masyarakat masih banyak yang belum terselesaikan, salah satunya persoalan keluarga pra sejahtera.

Berdasarkan pada uraian yang telah di sampaikan tersebut mengenai bentuk model pemberdayaan melalui Peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan

---

<sup>4</sup> Al-qur'an Al-Karim. Al-qur'an Terjemah, (Saudi:Khatim Al-Haramain, 2010), 156.



Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Oleh sebab itu peneliti memiliki ketertarikan melaksanakan penelitian berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Penanganan Keluarga Pra Sejahtera di Kabupaten Jember”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam pokok permasalahan ini ialah:

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan program pemberdayaan keluarga pra sejahtera di kota Jember?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat pra sejahtera terhadap program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dikota Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan program pemberdayaan keluarga pra sejahtera di kota Jember.
2. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat pra sejahtera terhadap program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dikota Jember.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian terbagi secara teoritis dan praktis,diantaranya:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dimaksudkan bisa menjadi referensi untuk penelitian berikutnya terutama terkait peran DP3AKB pada penanganan keluarga pra sejahtera di kabupaten Jember.
- b. Penelitian ini dimaksudkan bisa meningkatkan pengetahuan mahasiswa khususnya mahasiswa program studi Pengembangan Masyarakat Islam untuk memahami model pemberdayaan pada keluarga pra sejahtera.
- c. Relevansi dengan prodi PMI sesuai dengan mata kuliah yang ada pada program studi *Community Development*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Peneliti: bisa meningkatkan wawasan serta pemahaman terkait pemberdayaan masyarakat dan modelnya, bisa mengetahui metode memfasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan, serta bisa mengetahui permasalahan-permasalahan tentang keluarga pra sejahtera di kabupaten Jember.
- b. Untuk masyarakat: penelitian ini dimaksudkan memberi kejelasan dan pemahaman terkait Peran DP3AKB dalam Penanganan keluarga pra sejahtera di Kota Jember sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan program dalam pengembangan masyarakat.
- c. Untuk lembaga pendidikan UIN KHAS: bisa menjadi rujukan untuk mahasiswa UIN KHAS Jember serta memudahkan kerjasama antar UIN KHAS dengan pihak desa.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah terdiri atas definisi dari istilah yang dijadikan fokus penelitian.<sup>5</sup>

### 1. Pemberdayaan

Upaya memberikan beberapa daya ataupun kuasa untuk kelompok yang dianggap kurang berdaya dengan tujuan bisa memberikan berbagai peluang untuk kelompok tersebut dalam mengembangkan serta mempergunakan kemampuan yang dimiliki dalam internal maupun eksternal kelompok.<sup>6</sup>

### 2. Pemberdayaan perempuan

Usaha perempuan supaya mendapatkan akses serta kendali terhadap sumber daya, ekonomi, sosial, politik supaya bisa menumbuhkan kepercayaan diri sehingga memiliki peran dan partisipasi secara aktif untuk menyelesaikan persoalan dan membangun konsep diri.

### 3. Perlindungan anak

Berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memberi jaminan serta perlindungan untuk anak dan hak yang dimilikinya supaya bisa tetap tumbuh serta berkembang dengan maksimal berdasarkan harkat serta martabat kemanusiaannya, sekaligus memperoleh perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan gangguan.

---

<sup>5</sup>TimPenyusun,*PedomanKaryaIlmiah*,(Jember:IAINJemberPress,2017),45.

<sup>6</sup> Adimiharja dan Hikmat, 2004 dalam Ariffudin 2009

#### 4. Keluarga Berencana

Gerakan untuk menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera melalui pembatasan angka kelahiran. Itu artinya proses tersebut dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan alat kontrasepsi misalnya kondom, spiral, IUD, dan sejenisnya.

#### 5. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah suatu keluarga yang masih hidup dalam tingkat yang serba kekurangan. Kekurangan dalam berbagai aspek kehidupan yang layak. Keluarga pra sejahtera pada umumnya tidak hanya kurang mampu dalam tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus juga kekurangan dalam bidang finansial atau materi dan harta benda

### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan terdiri atas penjelasan dari rangkaian pembahasan skripsi mulai dari bab awal hingga akhir. Sistematika pembahasan pada skripsi ini ialah:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, terdiri atas penelitian terdahulu dan kajian teori terkait penelitian yang hendak dilaksanakan.

BAB III Metode Penelitian, terdiri atas metode yang nantinya dipergunakan pada penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, terdiri atas obyek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran dari peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam bagian ini peneliti menambahkan beberapa penelitian sebelumnya baik yang sudah dirilis atau belum dirilis berbentuk skripsi, jurnal, tesis dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini, selanjutnya peneliti meringkasnya. Melalui langkah ini, bisa diketahui Seberapa jauh orisinalitas serta posisi penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa penelitian tersebut ialah:

1. Penelitian dari Marito Sipahuta, UIN Sumatera Utara Tahun 2020. Penelitian ini mengkaji terkait masalah dalam menangani kemiskinan. Berdasarkan kondisinya, terdapat sebagian dari masyarakat miskin yang masih tidak mendapatkan penanganan dengan baik Misalnya bantuan sosial, perlindungan dan sejenisnya dari pemerintah setempat. Meskipun dinas sosial dan tenaga kerja Kecamatan setempat bertanggung jawab untuk memberi hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat miskin dengan permasalahan sosial. Seperti yang sudah tertera pada UU No 13 tahun 2011 terkait program penanganan fakir miskin. Pada penerapannya, pemerintah setempat diharuskan menangani masyarakat miskin secara langsung Berdasarkan aturan undang-undang, realitanya penanganan yang dilaksanakan masih jauh dari yang seharusnya. Maka dari itu aturan tersebut masih tidak selaras dengan realita serta efektivitasnya yang belum menunjukkan perubahan pada masyarakat miskin. Sehingga dari peristiwa tersebut penulis merumuskan beberapa permasalahan pada penelitian ini yakni Bagaimana Perlindungan

hukum terhadap fakir miskin menurut UU No 13 tahun 2011, serta jika ditinjau dari aspek fiqh siyasah. Penelitian ini bertujuan supaya melihat berbagai hal yang ada pada rumusan masalah. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif dengan populasi yakni masyarakat Kecamatan Bilah Barat. Sementara sampel pada penelitian ini ialah 28 warga Kecamatan Bilah Barat. Data didapatkan melalui metode observasi, wawancara serta analisis data melalui analisis kualitatif. Jadi perolehan penelitian bisa diketahui bahwasanya Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan UU No.13 Tahun 2011 di tinjau dari Fiqh Siyasah tidak secara penuh berlangsung dengan efektif serta optimal. Perihal tersebut disebabkan oleh banyaknya masyarakat miskin yang ada di kecamatan tersebut dikarenakan rendahnya penanganan serta implementasi aturan yang tidak sesuai sasaran dari dinas sosial setempat.<sup>7</sup>

2. Penelitian dari Reza (2017) penelitian ini bertujuan supaya Mengkaji Efektivitas P2FM melalui pendekatan KUBE pada konsep mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yang mana perolehan penelitian ini memperlihatkan bahwasanya program tersebut terlaksana dengan efektif. Perihal tersebut terlihat dari beberapa indikator diantaranya meskipun total bantuan yang diperoleh masih kurang namun pemberiannya cukup memadai, proses sosialisasi keterampilan untuk

---

<sup>7</sup> Marito Sipahuta, Skripsi., "Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 di tinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019).“ Sumatera Utara Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

penerima bantuan saling Memiliki kesinambungan, proses pendampingan sebagai instrumen utama untuk menjaga kelangsungan usaha dari setiap penerima bantuan dianggap efektif. Perihal tersebut dikarenakan tidak terdapat pendamping khusus untuk anggota meskipun digolongkan sebagai keluarga fakir miskin yang membutuhkan bimbingan untuk operasikan usahanya.<sup>8</sup>

3. Penelitian dari Sri Iryani (2017), penelitian ini mengkaji penuntasan fakir miskin pada desa kuok sesuai UU N0 10 tahun 2012. Perolehan penelitian ini ialah penanganan yang berlangsung telah sesuai aturan yang berlaku meskipun masih terdapat kendala seperti keinginan masyarakat supaya memperoleh bantuan yang diterima oleh fakir miskin tetapi pada pemantauan survei masyarakat masih belum termasuk kategori fakir miskin sehingga terjadi kemiringan dikalangan masyarakat.<sup>9</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan berlangsung ialah pembahasan terkait kemiskinan yang terdapat pada suatu daerah serta perihal tersebut ialah tugas pemerintah agar bisa menanganinya, perbedaan pada penelitian ini ialah acuan yang dipergunakan, yang mana peneliti mempergunakan acuan pada UU No 13 tahun 2011 terkait penanganan fakir miskin, sementara penelitian terdahulu mempergunakan UU No 10 tahun 2012 sehingga terdapat perbedaan dalam penerapannya. Selain itu terdapat perbedaan pada objek penanganan

---

<sup>8</sup>Reza, Skripsi:, "Efektivitas Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) Terhadap Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Perspektif Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE))", Tahun 2017.

<sup>9</sup> Sri Iryani, Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim, Riau, 2015.



kemiskinan yang akan dilaksanakan pada penelitian ini ialah Kelurahan Jelutung, sementara penelitian sebelumnya berada di desa kuok. Tentunya dari kedua desa tersebut memiliki perbedaan dalam proses untuk menangani kemiskinan.

**Tabel 2. 1**  
**Originalitas Penelitian**

No	Nama, Tahun dan Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Marito Sipahuta, Tahun 2019, UIN Sumatera Utara	“Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 di tinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)”	1)Mempergunakan teknik kualitatif. 2) Mengguanakan tema penelitian terkait penanganan fakir miskin	1)Objek penelitian 2) Lokasi Penelitian
2.	Reza, Tahun 2017, Universitas Jember	“Efektivitas Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) Terhadap Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Perspektif Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE))”,	1)Mempergunakan teknik penelitian Kualitatif 2). Mengguanakan tema penelitian terkait penanganan fakir miskin	1)Objek Penelitian 2) Lokasi Penelitian

No	Nama, Tahun dan Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Sri Iryani, Tahun 2015, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru	“Penanganan fakir miskin di desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar menurut peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012”	1)Mempergunakan kualitatif. 2) Mengguanakan tema penelitian terkait penanganan fakir miskin	1)Objek Penelitian 2) Lokasi Penelitian

Dari ketiga penelitian diatas bisa disimpulkan bahwa pada penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yakni terdapat pada peran pemerintah dalam menangani permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat yakni tak jauh dari kemiskinan. Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada fokus penelitian yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menanggulangi permasalahan keluarga pra sejahtera. Keterbaharuan dari skripsi ini yakni terletak pada pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini dalam peran dan keterlibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam keluarga pra sejahtera.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Kajian tentang Pengertian Konsep dan Teori Peran**

Teori peran mengutarakan bahwasanya peran ialah rangkaian perilaku yang berbeda. Namun apa yang menjadikan perilaku tersebut sesuai dengan sebuah kondisi serta tidak sesuai dengan kondisi lainnya yang relatif bebas pada individu yang melaksanakan peran tersebut.

Sementara Poerwodarminta (1995) Mengemukakan peran ialah sikap yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok pada sebuah kejadian. Maksudnya ialah perangkat tingkah laku yang diinginkan serta dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Menurut KBBI, peran ialah rangkaian yang diinginkan serta dimiliki oleh individu yang memiliki kedudukan di masyarakat.<sup>10</sup>

Peran pemerintah yang maksimal bisa menciptakan masyarakat sehingga peran pemerintah tersebut merupakan yang disampaikan oleh Yusuf (2014) yakni:

a. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah selaku regulator yakni menyiapkan dan memiliki kewajiban supaya menyiapkan arah dalam rangka menyalurkan implementasi pembangunan dengan menerbitkan aturan. Pemerintah selaku regulator diharapkan memberi landasan untuk masyarakat selaku instrumen supaya bisa mengelola Seluruh aktivitas dalam menyelenggarakan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah selaku dinamisator menggerakkan partisipasi masyarakat jika terdapat permasalahan selama berlangsungnya pembangunan agar dapat meningkatkan serta memelihara dinamika beragam kepentingan masyarakat untuk memaksimalkan pembangunan daerah. Pemerintah mempergunakan bimbingan dan arahan secara

---

<sup>10</sup> Poerwodarminta 1995. KBBI. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

intensif dan efektif kepada masyarakat. Secara umum bimbingan tersebut diberikan melalui tim penyuluhan ataupun Badan Khusus supaya memberi pelatihan.

c. Pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah selaku fasilitator memberi dan menciptakan keadaan yang kondusif supaya terlaksananya pembangunan daerah. Pemerintah memiliki tugas untuk mendampingi dengan melakukan pelatihan, pendidikan serta peningkatan keterampilan pada aspek pembiayaan ataupun pemberian bantuan modal untuk masyarakat yang diberdayakan.<sup>11</sup>

## **2. Kajian tentang Pemberdayaan Perempuan**

### **a. Pengertian Pemberdayaan**

Menurut Jim Ife (1997), pengertian dari pemberdayaan adalah memberi sumberdaya, peluang, wawasan serta keterampilan untuk masyarakat supaya bisa mengoptimalkan kemampuannya untuk menentukan masa depan secara mandiri dan ikut serta untuk mempengaruhi kehidupan kelompoknya. Jim Ife juga mengutarakan konsep pemberdayaan yang memiliki keterkaitan erat dengan 2 konsep pokok yaitu konsep daya dan ketimpangan. Selain itu terdapat enam macam kekuatan masyarakat yang bisa dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat, diantaranya:

---

<sup>11</sup> Yusuf, Iyas. 2014. Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat. Di akses tanggal, 25 Juli, 2020. <http://www.iyasyusuf.asia/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintah-dalam-html>

- 1) Kekuatan menetapkan pilihannya sendiri
- 2) Kekuatan menetapkan kebutuhannya sendiri
- 3) Bebas berekspresi
- 4) Kekuatan kelembagaan
- 5) Mengakses sumberdaya ekonomi
- 6) Kebebasan untuk bereproduksi.

Dengan mengidentifikasi kekuatan masyarakat dan ketimpangan yang mengakibatkan terbelakang, ada 3 cara pemberdayaan yang dapat dilaksanakan, yakni:

- 1) Memberdayakan dengan membuat rencana serta kebijakan yang dilakukan melalui pembangunan ataupun perubahan struktur serta lembaga yang mampu memberi akses yang sama pada sumber daya, layanan dan peluang untuk ikut serta pada kehidupan masyarakat.
- 2) Memberdayakan dengan melakukan aksi sosial dan politik untuk menciptakan kekuasaan yang efektif.
- 3) Memberdayakan dengan melakukan pendidikan serta menumbuhkan kesadaran melalui beragam aspek. Usaha ini dilaksanakan supaya memberi bekal pengetahuan serta keterampilan untuk masyarakat di lapisan bawah serta bisa mengoptimalkan kekuatannya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>SyamsulDwiMaarif, "Mengenal Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli" (<https://tirto.id/mengenal-teori-pemberdayaan-masyarakat-menurut-para-ahli-gbyu>, Diakses pada 29 Maret 2021)

Gagasan pemberdayaan ialah pusat untuk sebuah strategi keadilan social dan HAM, meskipun pemberdayaan ialah kata yang telah digunakan berulang kali serta sedang dalam bahaya kehilangan artsubstantifnya .Ia udahlah pusat dari ide kerja masyarakat serta berbagai pekerja masyarakat akan memilih mengartikan perannya pengertian sebuah proses pemberdayaan.<sup>13</sup>

#### **b. Pengertian Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan perempuan ialah usaha perempuan agar mendapatkan akses serta kontrol pada sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya supaya mereka bisa mengontrol diri serta mengoptimalkan kepercayaan dirinya agar bisa menjalankan peran dan ikut serta secara aktif untuk menyelesaikan permasalahan supaya bisa menciptakan kemampuan serta konsep diri.

Pemberdayaan perempuan ialah suatu proses beserta tujuannya. Maka dari itu, pemberdayaan perempuan tidak bisa dilepaskan dari pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan dalam menciptakan masyarakat yang memiliki kemandirian, bisa menggali serta mempergunakan kemampuan yang dimiliki oleh daerahnya serta mempermudah masyarakat agar memiliki kebebasan dari keterbelakangan hingga kemiskinan. Data indikator kinerja pemberdayaan perempuan dan masyarakat sangatlah diperlukan yakni :

---

<sup>13</sup> JimIfe, Frank Tesoriero, *“Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat tdi Era Globaliisasi”* (Yogyakarta:PustakaPelajar.2016), 130.

Persentase partisipasi Perempuan pada aspek Pemerintah, Swasta, dan Politik

- 1) Persentase Pembinaan Organisasi Perempuan
- 2) Persentase Penurunan Pernikahan Usia di Bawah 20 Tahun
- 3) Prevalensi Pasangan Usia Subur ber KB
- 4) Persentase Lembaga Bina Keluarga Berkategori Percontohan
- 5) Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera
- 6) Persentase Desa yang Telah Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
- 7) Persentase Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat
- 8) Persentase Desa yang Memiliki Profil<sup>14</sup>

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ialah dua perihal yang memiliki keterkaitan. Negara berkewajiban memberi jaminan untuk hak perempuan dan anak yang ada di Indonesia selaku penentu dari kualitas generasi bangsa Indonesia di masa mendatang.

### **Tantangan Pemberdayaan Perempuan**

Ukuran kualitas hidup perempuan Indonesia mulai mengalami peningkatan. Tetapi dalam menciptakan kesetaraan perempuan pada berbagai aspek bukan suatu hal yang bisa terlaksana dengan mudah. Tetap dibutuhkan proses serta kerja keras agar bisa meraih hal tersebut, terutama kesejahteraan perempuan. Perempuan diharuskan memiliki kesiapan untuk berhadapan dengan rintangan.

---

<sup>14</sup> Indikator Kinerja Pemda oleh Bappeda DIY

Saya selaku wakil rakyat yang bertugas serta memiliki wewenang untuk menyerap, mengumpulkan, menampung serta melakukan tindak lanjut pada setiap aspirasi khususnya pada daerah pemilihan, saya memiliki konsentrasi pada isu pemberdayaan perempuan yang perlu memperoleh respon dikarenakan permasalahan perempuan di Indonesia sangatlah beragam. Contohnya diskriminasi pada perempuan, KDRT, kekerasan seksual, kesenjangan upah atau pemberdayaan pelaku UMKM perempuan. Fenomena tersebut mengharuskan berbagai pihak untuk ikut serta supaya perempuan menjadi sosok yang tangguh di dalam keluarga serta kehidupan sosial dan tidak sekedar hanya sebagai sosok di dapur, kasur dan sumur.<sup>15</sup>

**c. Peluang pemberdayaan perempuan**

Dalam Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan No XVII dari (Zakiah 2010) mengemukakan bahwasanya pemberdayaan perempuan ialah perubahan keterkaitan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada tingkatan berbeda yaitu keluarga, masyarakat, pasar hingga negara. Perempuan memiliki kedudukan yang lebih baik hanya pada saat mereka bisa mandiri serta mempunyai akses pada kepuasan terkait kehidupan mereka sendiri.

Pemberdayaan perempuan merupakan tahapan utama untuk mendongkrak peran perempuan supaya bisa menghasilkan karya,

---

<sup>15</sup> Melani Leimena Suharli Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dewan Kehormatan DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) upload 09 September 2020



memiliki kemandirian serta posisi tawar. Maka dari itu, keikutsertaan perempuan pada beragam aspek kehidupan mempunyai beragam fungsi diantaranya meraih kesetaraan akses pada berbagai aspek.

Pada era globalisasi saat ini sebuah negara dikatakan maju jika memiliki kepedulian serta memberi peluang secara luas pada pemberdayaan perempuan, supaya memperoleh kesetaraan serta keadilan gender. Kesempatan pemberdayaan perempuan pada berbagai aspek kehidupan harus senantiasa ditata serta diperhatikan, terutama pada hal:

Pertama, pemberdayaan perempuan di masyarakat telah terlihat secara nyata pada aspek pendidikan, sosial, politik dan sebagainya. Perempuan menjalankan berbagai peran dan profesi seperti pengusaha, guru, dokter dan sebagainya.

Kedua, pada kehidupan ekonomi, konsep patriarki tidak jarang masih mengkerdikan peran perempuan. Tidak jarang pekerjaan perempuan pada aspek informal dianggap tidak memiliki nilai ekonomi sebab hanya sebagai seseorang yang mencari nafkah tambahan untuk keluarganya. Tetapi pada sisi lain kita mengetahui bahwasanya kehidupan perekonomian hampir tidak bisa mengalami perkembangan jika tidak ada perempuan yang terlibat di dalamnya. Pada alur perekonomian sebuah negara, perempuan memiliki peran dalam menciptakan perekonomian keluarga. Ketika roda perekonomian

keluarga sudah berlangsung maka secara otomatis dapat mendorong perekonomian negara.

Ketiga, pada kehidupan bernegara. Tentunya kita mengetahui suatu kutipan bahwasanya perempuan adalah tiang negara. Sebuah negara akan kuat apabila memiliki tiang yang kokoh. Begitu pula sebaliknya, jika perempuan mengalami keterbelakangan serta penindasan maka akan terjadi kemunduran pada suatu negara.<sup>16</sup>

Walaupun kini masih belum meraih representative yang tinggi, kita memahami bahwasanya perempuan Indonesia menjadi anggota legislatif, menteri, kepala daerah, hingga presiden.

#### **d. Tujuan Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan perempuan pada dasarnya bertujuan agar menciptakan kesadaran perempuan supaya tercipta kesetaraan yang nantinya menjadikan mereka mampu melakukan pengembangan pada kemampuannya, memiliki kemandirian, berpartisipasi pada pembangunan serta melahirkan kesejahteraan.

Pada buku “Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial”, Gunawan Sumodiningrat tahun 2001 mengemukakan bahwasanya pemberdayaan perempuan memiliki 3 tujuan, yakni:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Zakiah pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita No XVII tahun 2010

<sup>17</sup> Gunawan Sumodiningrat " Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial" hal 11 Tahun 2001

Pertama, membangun eksistensi perempuan. Perempuan diharuskan memahami bahwasanya dirinya dan laki-laki memiliki hak yang sama. Perempuan mempunyai peluang yang sama dalam meningkatkan kemampuannya.

Kedua, perempuan memiliki hak menentukan pilihannya. Perempuan mampu menentukan pilihan hidupnya dengan proses berdialog.

Ketiga, perempuan mempunyai pada dirinya, bahwasanya terdapat kesetaraan serta kedudukan setara dengan laki-laki pada sektor publik atau domestik.

Jika ketiganya dipenuhi, maka kesejahteraan perempuan, anak, dan keluarga bisa terwujud. Jika perempuan mempunyai peluang setara, berhak menentukan pilihannya, serta berkedudukan setara pada sektor publik atau domestik, maka perjuangan kesetaraan gender telah mencapai tujuannya.

### **3. Kajian tentang Perlindungan anak dan Keluarga Berencana**

#### **a. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan Anak ialah berbagai aktivitas dalam memberi jaminan serta perlindungan anak dan hak yang dimilikinya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang dan ikut serta dengan maksimal berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan yang dimiliki dan mendapatkan perlindungan dari adanya kekerasan maupun diskriminasi.

Menurut UUP yang dimaksud dengan :

- 1) Anak ialah anak yang usianya < 18 tahun, termasuk bayi dalam kandungan.
- 2) Perlindungan anak ialah berbagai aktivitas untuk memberi jaminan anak serta hak yang dimilikinya supaya bisa hidup, tumbuh, dan berkembang, dengan maksimal berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan.
- 3) Keluarga ialah kelompok masyarakat paling kecil yang berisi suami istri dengan atau tanpa anak, atau ayah/ibu dan anak, atau keluarga sedarah.
- 4) Orang tua ialah ayah dan/atau ibu kandung, tiri, atau angkat.
- 5) Wali ialah orang atau badan yang secara realita memiliki kuasa dalam mengasuh anak.
- 6) Anak terlantar ialah anak yang tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan dengan semestinya.
- 7) Anak yang menyandang cacat ialah anak yang menderita permasalahan fisik maupun psikis sehingga menghambat tumbuh kembangnya.
- 8) Anak yang mempunyai kelebihan ialah anak yang memiliki kecerdasan luar biasa, atau kemampuan dan istimewa.
- 9) Anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab untuk merawat, mendidik serta membesarkannya, ke dalam

lingkungan keluarga orang tua angkat sesuai keputusan atau ketentuan pengadilan.

- 10) Anak asuh ialah anak yang dirawat perseorangan maupun lembaga, supaya memperoleh bimbingan, hingga pendidikan karena orang tuanya tidak dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anaknya.
- 11) Kuasa asuh ialah kekuasaan orang tua dalam memberi asuhan, pembinaan, pendidikan, perlindungan serta menumbuhkan perkembangan anak sesuai dengan agam yang diikuti serta minat bakatnya.
- 12) Hak anak termasuk dari HAM yang harus memperoleh jaminan, perlindungan serta pemenuhan dari keluarga, masyarakat, hingga negara.
- 13) Masyarakat ialah individu maupun kelompok secara sosial atau kemasyarakatan.
- 14) Pendamping ialah pekerja sosial dengan keahlian pada bidangnya.
- 15) Perlindungan khusus ialah perlindungan untuk anak dalam kondisi darurat, memiliki permasalahan hukum, anak dari kalangan minoritas, yang tereksplorasi, yang diperjual belikan, korban penyalahgunaan napza, korban penculikan, penjualan, korban kekerasan secara fisik maupun psikis, penyandang cacat, dan korban penelantaran.
- 16) Setiap orang ialah individu atau korporasi.

17) Pemerintah ialah Pemerintah yang mencakup Pemerintah Pusat dan daerah.<sup>18</sup>

#### **b. Pengertian Keluarga Berencana**

Keluarga berencana ialah gagasan dalam menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera melalui pembatasan kelahiran. Itu artinya perencanaan total keluarga melalui pemberian batas yang dapat dilaksanakan melalui alat kontrasepsi misalnya kondom, spiral, IUD, dan lain-lain.

Menurut Hartanto (2004), Keluarga berencana ialah tindakan yang memudahkan seseorang maupun pasangan suami istri agar memperoleh objek tertentu, yakni: menghindari dari kelahiran yang tidak diharapkan, memperoleh kelahiran yang diharapkan, mengatur interval antar kehamilan, menentukan banyaknya anak pada keluarga<sup>19</sup>.

Menurut ( DP3AKB,2015) Keluarga Berencana ialah usaha dalam menciptakan keluarga yang memiliki kualitas baik dengan melindungi, mempromosikan serta membantu meraih hak-hak reproduksi dan melayani, mengatur serta mendukung segala yang dibutuhkan demi menciptakan keluarga dengan usia pernikahan ideal, menentukan jumlah, jarak, serta usia yang tepat untuk melahirkan anak sekaligus menentukan interval antar kehamilan dan mensejahterakan

---

<sup>18</sup> UU perlindungan anak nomer 23 pasal 1 Tahun 2002

<sup>19</sup> Hartanto 2004

anak.<sup>20</sup> Kemudian Mukti (2000) mengemukakan bahwasanya Keluarga Berencana ialah usaha supaya menjamin kesehatan anak atau Ibu salah satunya jaminan pendidikan yang termasuk bekal berharga bagi kehidupan anak di masyarakat suatu hari nanti agar bisa memenuhi kesejahteraan keluarga secara lahir dan batin.<sup>21</sup>

Menurut UU No 52 Tahun 2009, Keluarga Berencana ialah sebuah program kemasyarakatan yang mengerahkan seluruh kemampuan masyarakat supaya ikut serta secara aktif pada kelembagaan serta kebudayaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera demi meningkatkan kualitas sdm dengan pendewasaan usia perkawinan, mengatur kelahiran, membina ketahanan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.<sup>22</sup>

#### **4. Kajian Tentang Keluarga Pra Sejahtera**

Keluarga pra sejahtera adalah suatu keluarga yang masih hidup dalam tingkat yang serba kekurangan. Kekurangan dalam berbagai aspek kehidupan yang layak. Keluarga pra sejahtera pada umumnya tidak hanya kurang mampu dalam tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus juga kekurangan dalam bidang finansial atau materi dan harta benda.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> DP3AKB, Tahun 2015

<sup>21</sup> Mukti Pengertian Keluarga Berencana tahun 2000

<sup>22</sup> UU Perkembangan Penduduk Dan Pembangunan Keluarga tahun 2009

<sup>23</sup> M. Dian Antariksa, dkk. "Peranan Orang Tua Keluarga Pra Sejahtera dalam Pendidikan Anak", (Bandar Lampung : FKIP Unila, 2018), hlm. 3

Keluarga Prasejahtera merupakan keluarga yang orangtuanya masih belum mampu memenuhi kebutuhan pokok sepenuhnya dalam keluarga. Dalam keluarga prasejahtera tidak ada suatu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap anggota keluarganya. Sehingga dari bentuk keluarga tersebut akan menghasilkan suatu focus untuk memulihkan keadaan perekonomian saja, tanpa mementingkan pendidikan antar keluarga.<sup>24</sup>

Pada keluarga prasejahtera tidak ada suatu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap anggotanya. Sehingga dari bentuk keluarga tersebut akan menghasilkan satu focus untuk memulihkan keadaan ekonominya saja, tanpa memikirkan sosialisasi antar keluarga. Pada keluarga yang tergolong memiliki perekonomian rendah, anggota keluarga satu dengan yang lainnya akan memiliki sikap egois untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut.

Enam Indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs) adalah:

- a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (staple food), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.

---

<sup>24</sup> Reiza Nuary Asih Hartono. "Peran Orangtua Dalam Pendidikan Karakter Anak Pada Keluarga Prasejahtera", Skripsi, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), hlm. 7.



- b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).
- c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik. Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.
- d. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, apotek, posyandu, poliklinik, bidan desa dan sebagainya, yang memberikan obat-obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/BPOM).
- e. Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, apotek, posyandu, poliklinik, dokter swasta, bidan

desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, kondom, implan, suntikan dan pil, kepada pasangan usia subur yang membutuhkan. (Hanya untuk keluarga yang berstatus pasangan usia subur).

- f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/ sederajat SD atau setingkat SLTP/ sederajat SLTP.<sup>25</sup>

Menurut Haryono Suyono, sekitar 56% keluarga di Indonesia masih berada dalam tingkat prasejahtera dan sejahtera I. Mereka belum tergolong miskin, tetapi baru bisa memenuhi kebutuhan fisik minimal. Pada kondisi tersebut, mereka mudah sekali jatuh menjadi miskin. Dalam program pembangunan keluarga sejahtera BKKBN, keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I lebih tepat disebut sebagai keluarga tertinggal. Karena yang disebut sebagai keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, belum mampu melaksanakan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing, memenuhi kebutuhan makan minimal dua kali sehari, pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian, memiliki rumah yang bagian lantainya bukan dari

---

<sup>25</sup> Inayatillah. "Tingkat Keutuhan Keluarga Pada Keluarga Prasejahtera Di Kecamatan Darussalam", Skripsi. (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, 2018), hlm. 13-38

tanah, dan belum mampu untuk berobat di sarana kesehatan modern. Menurut BKKBN kriteria keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah keluarga pra sejahtera (Pra-KS) dan keluarga sejahtera I (KS I).

Ada beberapa kriteria keluarga prasejahtera, yaitu:

- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing.
- b. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih.
- c. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah. Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> perorang.
- d. Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern dengan menggunakan kartu BPJS.
- e. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambo/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
- f. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- perbulan pendidikan tertinggi kepala rumah tangga yaitu tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> U'thiya Ni'matur Robiah. "Pola Asuh Orangtua Dalam Membina Akhlaq Anak Usia Dini Sekolah Dasar Pada Keluarga Prasejahtera Di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak", Skripsi, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2018, hlm. 59.

Mereka di kategorikan sebagai Keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator di atas. Keluarga pra sejahtera di Jember rata-rata masih berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Rumah yang digunakan juga masih sangat sempit bahkan masih pada kualitas yang rendah dengan dinding rumah kayu/ bambu lantai rumah yang masih tanah dan atap yang berlubang sehingga mengakibatkan kebocoran. Ada juga yang dengan kondisi anak yang sangat banyak menyebabkan banyak dari mereka tidak bersekolah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilaksanakan ialah mempergunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif ialah sebuah penelitian lapangan yang berlandaskan pada beragam jenis teori serta data kepustakaan. Jenis tersebut dipergunakan supaya memberi deskripsi seluruh bahan penelitian yang diperoleh dari wawancara, pengamatan serta dokumentasi sebab peneliti berkeinginan untuk menjelaskan peristiwa berdasarkan tema yang dipilih. Peneliti mempergunakan pendekatan jenis ini dikarenakan pada masalah yang hendak dikaji tidak mampu dijelaskan melalui angka. Melainkan mempergunakan penjelasan terkait objek penelitian.

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penelitian ialah kualitatif deskriptif dikarenakan penelitian kualitatif memberi pemahaman serta mendeskripsikan tentang model pengembangan masyarakat melalui peran DP3AKB untuk menanggulangi keluarga pra sejahtera.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitiannya yang memperlihatkan tempat berlangsungnya penelitian yakni kantor DP3AKB Kabupaten Jember dan Kantor PLKB Kecamatan Balung. Dengan mengunjungi kantor DP3AKB dan PLKB yang berkaitan dengan penanganan keluarga pra sejahtera melalui pemberian bantuan oleh pemerintah yang harus tepat sasaran. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan

dengan sengaja. Melalui pertimbangan kondisi wilayah yang menunjukkan beragam permasalahan keluarga pra sejahtera.

### **C. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini berlandaskan pada usaha memperoleh data. Data penelitian didapatkan dari subjek dan informan yang memahami keadaan social masyarakat di Kabupaten Jember dan peran DP3AKB yang Berencana untuk menangani keluarga pra sejahtera.

Berikut merupakan beberapa informan yang sangat penting untuk memperoleh data dari penelitian ini, yakni:

1. Setijo Arliyanto S.P. Jabatan: Kasubag umum dan kepegawean kantor DP3AKB Kabupaten Jember. Nantinya kita mengetahui program-program untuk penanganan keluarga pra sejahtera beserta sasaran dan sarana yang akan dituju.
2. Osias Anto Budi, N.Se. Jabatan: Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana ( Kb-Ks).

Dari kb-ks dan keluarga berencana kita dapat mengetahui program-program untuk penanganan keluarga pra sejahtera beserta sasaran yang akan dituju. dan kebijakan dalam menanggapi tentang permasalahan sosial terutama keluarga pra sejahtera yang berada di Kabupaten Jember.

3. Kusen SH. Jabatan: Koordinator DP3AKB Kecamatan Balung

Dari Koordinator DP3AKB akan didapatkan data akurat tentang latar belakang peran DP3AKB untuk menangani keluarga pra sejahtera di Kabupaten Jember, kegiatan apa saja yang dilaksanakan Koordinator

DP3AKB dalam menanggapi kemiskinan dalam keluarga pra sejahtera hambatan apa saja yang dialami oleh Koordinator DP3AKB dokumen, serta data-data pendukung yang bersangkutan langsung dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peran DP3AKB dalam penanganan keluarga pra sejahtera.

#### 4. Masyarakat yang menerima program dari pemerintah

Dari masyarakat nantinya didapatkan data terkait latar belakang dari program DP3AKB dalam penanganan keluarga pra sejahtera serta yang dilaksanakan masyarakat supaya mensukseskan program Penanganan keluarga pra sejahtera untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Jember.

#### **D. Teknik pengumpulan data.**

Data pada penelitian ini didapatkan dari penggunaan metode pengambilan data sekunder dan primer, yakni :

1. Data primer didapatkan dari studi lapangan, yakni melalui penggunaan wawancara bersama pihak yang berkaitan dan memahami masalah yang dikaji pada penelitian ini.
2. Data sekunder yang didapatkan dari studi pustaka yakni melalui pengumpulan seluruh aturan undang-undang, dokumen, buku, maupun literatur ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah pada penelitian ini. Supaya memperoleh data yang dibutuhkan maka metode pengumpulan data yang dilaksanakan ialah:

a. Wawancara

Wawancara termasuk teknik dalam memperoleh data melalui berkomunikasi secara pribadi antara peneliti dan narasumber.<sup>27</sup> Data wawancara sangat penting untuk kevalidan hasil data yang diperoleh. Hasil dari wawancara tersebut yakni mengenai :

- 1) Bagaimana peran BP3AKB sebagai regulator?
- 2) Bagaimana peran BP3AKB sebagai dinamisator?
- 3) Bagaimana peran BP3AKB sebagai vasilitator?
- 4) Bagaimana peran BP3AKB dalam penanggulangan kasus keluarga prasejahtera di kota Jember?
- 5) Apa yang anda inginkan dari BP3AKB?
- 6) Bagaimana keterlibatan keluarga pra sejahtera dalam program BP3AKB?

b. Observasi

Observasi ialah studi yang secara sengaja serta tersistematis terkait fenomena social serta fenomena psikis dengan mengamati serta mencatat. Pada perihal ini yang dilaksanakan hanya sebatas materi yang diperlukan dalam penelitian ini. Yakni terfokus pada usaha DP3AKB dalam penanganan keluarga pra sejahtera di Kabupaten Jember supaya bisa meningkatkan perekonomian dan taraf hidup merema. Pada perihal ini peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian serta mengobservasi

---

<sup>27</sup> 3 Azuar Juliandi & Irfan, Metodologi penelitian kuantitatif, ( Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013),. 88



dan melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat, maupun perangkat DP3AKB yang ada disana. Data yang diperoleh yakni :

- 1) Buku pendataan keluarga pra sejahtera yang sudah dicatat oleh BP3AKB
- 2) Pelatihan yang sedang dijalankan oleh BP3AKB
- 3) Bantuan yang dilakukan oleh BP3AKB dalam penanggulangan kasus keluarga pra sejahtera.
- 4) Keterlibatan masyarakat dalam program BP3AKB

c. Dokumentasi

Metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini ialah dengan mengumpulkan beberapa data misalnya dokumentasi, catatan penting yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji sehingga bisa mendapatkan data sebanyak mungkin. Alasan penggunaan metode dokumentasi ialah disebabkan oleh mayoritas data serta realitas ada pada dokumentasi. Metode ini dipergunakan supaya menguatkan data yang didapatkan dari hasil wawancara serta pengamatan. Metode dokumentasi pada penelitian ini dipergunakan untuk mengumpulkan data berbentuk arsip, dokumen, catatan terkait peran DP3AKB dalam menangani keluarga pra sejahtera. Dokumentasi yang diperoleh yakni :

- 1) Profil dan visi misi DP3AKB
- 2) Pelatihan yang dilaksanakan DP3AKB

## E. Analisis Data

Analisis data termasuk tahapan penelitian yang menjadi penentu kesesuaian serta kevalidan dari hasil penelitian.<sup>28</sup>

Analisis data ialah susunan data berdasarkan tema serta kategori agar memperoleh jawaban dari rumusan masalah. Maka dari itu data yang diperoleh harus aktual dan secara mendalam, jika mungkin kan seharusnya mencari data sebanyak mungkin agar bisa melakukan analisis secara mendalam. Metode analisis yang dipergunakan ialah kualitatif. Perihal tersebut berlandaskan oleh perkembangan bahwasanya penelitian ini mengkaji aspek sosial yang berhadapan dengan berbagai fenomena sosial yang kompleks, metode kualitatif juga barusan peneliti untuk melakukan wawancara dengan informasi secara lebih dalam, aktual serta terpercaya agar memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang nantinya tersaji secara manual. Apabila terdapat angka maka angka itu hanya data yang mendukung analisis. Analisis data memperlihatkan data kualitatif yang ditempuh melalui:

### 1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

---

<sup>28</sup> UmarSidiq, Moh.MiftachulChoiri, MAMetodePenelitianKualitatifdiBidanPendidikan(Ponorogo:CV.NataKarya,2019). 50.

## 2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Pereduksian data yang dilakukan oleh peneliti, dengan melakukan penyusunan data secara sistematis, dilanjutkan dengan penulisan data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk naratif. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis ke dalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen di lapangan, dan data disusun berdasarkan fokus penelitian.

## 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Proses selanjutnya penarikan kesimpulan sementara dari informasi yang didapat dari lapangan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti - bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Selanjutnya peneliti melakukan verifikasi dari hasil penelitian. Bila kesimpulan sementara tersebut perlu mendapat data tambahan, maka dilakukan proses pengumpulan data kembali. Setelah selesai verifikasi maka peneliti melakukan pembahasan hasil temuan dari lapangan. Penarikan kesimpulan, dalam pandangan hanyalah sebagian dan satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Singkatnya, makna-makna yang muncul dan data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika

tidak demikian, yang dimiliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenaran dan kegunaannya.<sup>29</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Diantara metode yang dipergunakan untuk menguji kredibilitas ialah melalui triangulasi. Metode yang dipergunakan pada triangulasi dikemukakan oleh Sugiyono (2012), yakni:

##### 1. Triangulasi sumber

Dalam tahapan ini peneliti berupaya supaya memeriksa sumber yang merupakan objek penelitian dengan mengumpulkan serta menguji data berdasarkan pengamatan, wawancara dan dokumentasi supaya selanjutnya penulis bisa membandingkan keseluruhannya.

##### 2. Triangulasi teknik

Berikutnya ialah memeriksa data kepada sumber yang sama tetapi Melalui penggunaan metode berbeda. Pada perihal ini data yang sudah didapatkan diperiksa dengan wawancara, pengamatan serta dokumentasi. Jika ditemukan hasil data yang memiliki perbedaan maka penulis mendiskusikannya dengan informan yang bertujuan supaya mengetahui kevalidan dari suatu data.

---

<sup>29</sup> M. B. Miles, A. M. Huberman dan J. Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*, (USA: Sage Publications, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI Press, 2014), 14-15.

### 3. Triangulasi waktu

Dalam tahapan ini kredibilitas data yang sudah didapatkan oleh penulis ditentukan oleh waktu. Karena data yang didapatkan di pagi hari mungkin memiliki perbedaan dengan data yang didapatkan ketika siang atau malam hari<sup>30</sup>.

## G. Tahap-tahap penelitian

Tahapan penelitian yang dilaksanakan peneliti terdiri dari tiga tahapan yakni pralapangan, Pelaksanaan serta penyelesaian.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pra Lapangan
  - a. Melaksanakan identifikasi permasalahan
  - b. Membuat pertanyaan
  - c. Menemukan studi literatur
  - d. Pengamatan serta wawancara awal
  - e. Merumuskan tujuan serta manfaat penelitian
  - f. Menentukan judul penelitian
  - g. Menyerahkan judul kepada fakultas
  - h. Menentukan informan
  - i. Menyusun proposal penelitian
  - j. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing
  - k. Mengurus perizinan
  - l. Menyiapkan penelitian

---

<sup>30</sup> Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

## 2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

- a. Mendatangi langsung lapangan
- b. Menyesuaikan diri dengan informan
- c. Mengawali pencarian data melalui pengamatan terlebih dahulu
- d. Menggali data dengan wawancara
- e. Menggali data dengan dokumentasi
- f. Melakukan evaluasi data

## 3. Tahapan Penyelesaian

- a. Melakukan analisis data
- b. Melakukan penyajian data berbentuk laporan
- c. Melakukan penyempurnaan laporan melalui revisi data.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Peneliti

##### 1. Letak Geografis Kabupaten Jember

Jember ialah Kabupaten yang termasuk dari wilayah provinsi Jawa Timur yang lokasinya ada di lereng gunung Argopuro yang berdiri kokoh di bagian selatan hingga samudra Indonesia. Secara regional, Kabupaten Jember berkedudukan serta berperan strategis sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW).

Secara geografis ada di posisi 7059'6" - 8033'56" LS dan 113016'28" - 114003'42" BT dengan luas wilayah 3.293,34 Km<sup>2</sup>, dan memiliki topografi dataran ngarai yang subur di sisi tengah dan selatan serta sekelilingnya terdapat pegunungan dari barat hingga timur.

Kabupaten Jember mempunyai 82 pulau dan pulau terbesarnya ialah Nusa Barong. Kabupaten ini terletak di ketinggian 0- 3.300 mdpl. Sebagian wilayahnya ada di ketinggian 100-500 mdpl (37,75%), sebanyak 17,95% berada di ketinggian 0 - 25 m, 20,70% memiliki ketinggian 25-100 m, 15,80% ada di ketinggian 500.000 mdpl dan 7,80% di atas 1000 mdpl. Bagian barat daya mempunyai dataran yang memiliki tinggi 0-25 mdpl. Sementara bagian timur laut yang bersebelahan dengan Bondowoso dan bagian Tenggara bersebelahan dengan Banyuwangi mempunyai ketinggian di atas 1000 mdpl.

Berdasarkan letak topografi yang diperlihatkan melalui kemiringan tanah yang mana sebagian wilayahnya yakni 36,60% ada di area datar yang

memiliki kemiringan 0 - 2%, sehingga area tersebut cocok dijadikan area bermukim dan bercocok tanam. Kemudian area yang bergelombang hingga berbukit memiliki kemiringan melebihi 40% berada di wilayah 31,28%, area tersebut ialah perhutanan sekaligus menjadi pelindung hidrologi agar ekosistem tetap terjaga dengan seimbang. Sisanya ialah area landai hingga bergelombang yang memiliki kemiringan 2-15% berada di wilayah 20,46%, yang dipergunakan untuk pertanian dengan tanpa mempertimbangkan usaha pengawetan tanah dan air.

Sementara area bergelombang yang memiliki kemiringan 15 - 40% berada di area 11,66%, yang mana area tersebut sangat mudah mengalami erosi sehingga dibutuhkan pengawetan tanah dan air. Sebagian besar lahan di Kabupaten Jember dimanfaatkan sebagai kawasan hijau yang terdiri atas hutan, persawahan, tegal serta perkebunan.

Secara administratif, Kabupaten Jember memiliki 31 Kecamatan dan dibagi dalam 226 desa dan 22 Kelurahan. Mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani. Kebutuhan ekonomi masyarakat masih ditunjang dari pertanian. Jember memiliki banyak perkebunan yang sebagian besar didapatkan dari peninggalan Belanda. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan nasional dan perusahaan daerah. Jember dikenal sebagai daerah yang memproduksi tembakau utama di Indonesia yang dimanfaatkan untuk melapisi cerutu.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:



- |                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| a. Bagian Utara   | : Kab. Probolinggo dan Bondowoso |
| b. Bagian Barat   | : Kab. Lumajang                  |
| c. Bagian Selatan | : Samudera Hindia                |
| d. Bagian Timur   | : Kab. Banyuwangi                |

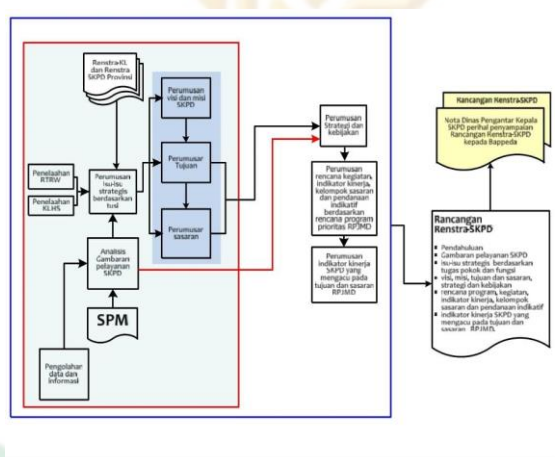
## 2. Profil Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

DP3AKB sebelumnya bernama BP2AKB (Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana). Pada dasarnya DP3AKB tidak mempunyai profil lembaga namun mempunyai Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). Renstra perubahan DP3AKB Kabupaten Jember ialah dokumen perencanaan DP3AKB selama 5 tahun yang terdiri atas tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program serta tugas dan fungsi DP3AKB yang berlandaskan pada RPJMD yang sifatnya indikatif. Proses menyusun Renstra Perubahan DP3AKB Kabupaten Jember terdiri atas persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

Renstra perubahan DP3AKB Kabupaten Jember berkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat hingga kabupaten atau kota. Keterkaitan Renstra perubahan DP3AKB dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra DPPAK Jatim, dan Renja DP3AKB marak pada tugas serta fungsi DP3AKB berdasarkan Perda terkait Organisasi Perangkat Daerah Jember, Perbup Jember terkait tugas serta fungsi DP3AKB, RPJMD, serta memperhatikan Renstra Kementerian / lembaga, Renstra Jatim, Rencana Tata

Ruang Wilayah Kab. Jember, serta Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Tahap dalam menyusun rancangan Restra DPPAKB Kabupaten Jember bisa terlihat pada gambar berikut:



**Gambar 4.1**

### **Bagan Alir Penyusunan Restra DPPAKB Kabupaten Jember**

Restra Perubahan DP3AKB Kabupaten Jember berkedudukan serta berfungsi strategis. Restra Perubahan DP3AKB Kabupaten Jember menjadi landasan pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP3AKB Kabupaten Jember yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Restra Perubahan DP3AKB Kabupaten Jember juga merupakan dasar pada pengendalian serta evaluasi pembangunan pada DP3AKB Kabupaten Jember, baik evaluasi Restra maupun evaluasi Renja DP3AKB Kabupaten Jember.

Maksud dan tujuan Penyusunan Restra Perubahan DP3AKB Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 ialah:

a. Maksud

Menyediakan landasan pengukuran serta memudahkan unit-unit kerja yang ada di lingkungan DP3AKB Kabupaten Jember supaya secara konsekuen dan konsisten melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya.

b. Tujuan

Menyediakan dokumen perencanaan DP3AKB Kabupaten Jember dalam jangka waktu 5 tahun yang melingkupi gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DP3AKB Kabupaten Jember sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jember berdasarkan tugas dan fungsi DP3AKB Kabupaten Jember.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan DP3AKB Kabupaten Jember ialah :

- a. Memberi arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DP3AKB Kabupaten Jember dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DP3AKB Kabupaten Jember untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja DP3AKB Kabupaten Jember.

- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur DP3AKB Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) DP3AKB Kabupaten Jember yang merupakan dokumen perencanaan DP3AKB Kabupaten Jember tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

Tugas dan fungsi organisasi secara umum sesuai Perda No 3 Tahun 2016 terkait pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perbup Jember No 46 Tahun 2016 tentang Kependuduk, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi DP3AKB Kabupaten Jember, secara umum sebagai berikut.

a. Tugas

DP3AKB Kabupaten Jember bertugas menjalankan urusan pemerintahan selaku kewenangan daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk-KB).

b. Fungsi

Fungsi dari DP3AKB ialah:

- 1) Merumuskan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk-KB).
- 2) Melaksanakan kebijakan daerah di Bidang PP-PA dan urusan di Bidang Dalduk-KB.
- 3) Mengevaluasi data dan pelaporan daerah di Bidang PP-PA dan urusan di Bidang Dalduk-KB.

- 4) Melaksanakan administrasi dinas Daerah di Bidang PP-PA dan urusan di Bidang Dalduk-KB.

DP3AKB Kabupaten Jember memiliki 31 wilayah kerja yang masing-masing dibagi di setiap Kecamatan, adapun salah satunya adalah Kecamatan Balung. Kecamatan Balung adalah sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Jember, Kecamatan ini terletak di bagian selatan kota Jember dengan luas 46.84 km<sup>2</sup>. Dengan 8 desa diantaranya Desa Curahlele, Gumelar, Balung Lor, Balung Kidul, Balung Kulon, Tutul Karangsemanding, dan karang Duren. Jumlah penduduk Kecamatan Balung menurut BPS Tahun 2020 sebanyak 80,569 jiwa dengan mata pencaharian rata-rata sebagai petani. Namun sebagian dari mereka juga banyak bekerja sebagai pedagang dan buruh tani.

3. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

- a. Visi

Terwujudnya Kabupaten Jember yang sejahtera, maju, Berkarakter, dan berkelanjutan

- b. Misi

Membangun sumber daya manusia unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar Lainnya.

#### 4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Berbup jember No 16 tahun 2021 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja DP3AKB Kabupaten Jember. Maka Struktur organisasinya ialah:

a. Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat membawahi :
  - a) Sub bagian umum dan kepegawaian
  - b) Sub bagian perencanaan dan pelaporan
  - c) Sub bagian keuangan
- 3) Bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan membawahi:
  - a) Seksi advokasi dan perlindungan perempuan
  - b) Seksi pengarusutamaan gender
  - c) Seksi pemberdayaan perempuan
- 4) Bidang perlindungan anak membawahi:
  - a) Seksi advokasi dan perlindungan anak
  - b) Seksi pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak
  - c) seksi kelembagaan Perlindungan Anak
- 5) Bidang pengendalian penduduk dan advokasi, pergerakan dan informasi membawahi:
  - a) Seksi pengendalian penduduk
  - b) Seksi advokasi dan pergerakan
  - c) Seksi data dan informasi

- 6) Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera membawahi:
  - a) seksi Keluarga Berencana
  - b) Seksi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
  - c) Seksi Bina ketahanan remaja
- 7) UPTD
- 8) Kelompok jabatan fungsional
  - a) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepada Dinas.
  - b) Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
  - c) Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
  - d) Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

Dari perolehan penelitian di lapangan terkait peran DP3AKB dalam penanganan fakir miskin di Kota Jember.

Disini peneliti menjelaskan perolehan temuan Melalui penggunaan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi dalam memperoleh data sebanyak mungkin di lapangan berdasarkan pertanyaan pada fokus penelitian.

Berdasarkan fokus penelitian sebelumnya maka data yang sudah didapatkan dari lapangan disajikan berikut ini:

## 1. Regulator

Regulator ialah menyiapkan tujuan dalam menyelaraskan implementasi kebijakan dengan menerbitkan aturan. Pemerintah selaku regulator dimaksudkan bisa memberi arahan mendasar untuk masyarakat sebagai instrumen supaya bisa mengelola Seluruh aktivitas pelaksanaan pemberdayaan. Pemerintah berperan untuk menangani kemiskinan pada keluarga pra sejahtera di Kota Jember dan terlihat dari beberapa indikator sebagai regulator.

Dari Indikator di atas terdapat beberapa pernyataan dari wawancara yang dilaksanakan kepada informan yaitu, Kasubag umum dan kepegaweian, kepala koordinasi PLKB, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana ( Kb-Ks), dan Masyarakat Penerima Bantuan.

Lanjut hasil wawancara dengan kb-ks dan Keluarga Berencana di DP3AKB Kota Jember mengemukakan bahwasanya:

“Kami selaku regulator tentunya memiliki berbagai metode yang dilakukan dalam penuntasan kemiskinan dalam keluarga pra sejahtera di Kota Jember misalnya dengan mendata masyarakat yang mana saat ini dilaksanakan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau PLKB, kemudian sesuai permasalahan dilapangan yang dilakukan oleh PLKB apa-apa permasalahan yang ditemukan sehingga kami berperan secara optimal untuk menyelesaikan kemiskinan di Kota Jember. Kami selaku regulator tentunya mengharapkan perolehan terbaik karena kami melakukan pekerjaan sebaik mungkin demi mencapai hal itu.”<sup>31</sup>”

Dari Keterangan tersebut bisa dipahami bahwasanya DP3AKB selaku regulator menjalankan tugas serta menuntaskan fakir miskin di Kota

---

<sup>31</sup> Bapak Antok, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana ( Kb-Ks), 01 Maret 2022.



Jember dengan mendata masyarakat serta mendata persoalan masyarakat yang dilaksanakan oleh PLKB, sehingga peran DP3AKB maksimal dalam menumpaskan kemiskinan di Kota Jember.

Berikutnya perolehan wawancara dengan masyarakat Kota Jember yang memperoleh bantuan dalam keluarga pra sejahtera mengemukakan bahwasanya:

“Tentunya pemerintah terutama DP3AKB secara langsung membantu kami dengan mendata dan Kami memperoleh bantuan tidak secara langsung melainkan ada verifikasi khusus yang harus dipenuhi misalnya kami diwajibkan untuk ikut pada seluruh tahapan program supaya ke depannya bantuan yang kami terima bisa bermanfaat.”<sup>32</sup>

Dari perolehan wawancara tersebut bisa dipahami bahwasanya pemerintah utama DP3AKB membantu masyarakat dengan mendata masyarakat yang tidak mampu, masyarakat memperoleh bantuan tidak secara langsung melainkan melakukan verifikasi khusus yang wajib terpenuhi misalnya dengan menjalankan seluruh program agar bantuan tersebut bisa bermanfaat.

Berikutnya perolehan wawancara dengan masyarakat kota Jember yang memperoleh bantuan keluarga pra sejahtera mengemukakan bahwasanya:

“Pemerintah langsung memberikan bantuan namun dengan mendata terlebih dahulu, Kami yang memperoleh bantuan tidak serta-merta memperolehnya melainkan ada jangka waktu yang harus kami tunggu sebelum diumumkan Siapa saja yang berhak mendapatkannya.”<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ibu Suparti, Keluarga Pra Sejahtera, 08 Juni 2022.

<sup>33</sup> Tumi, Keluarga Pra Sejahtera, 08 Juni 2022.

Dari perolehan wawancara di atas bisa dipahami bahwasanya pemerintah memberi bantuan melalui DP3AKB dengan melakukan pendataan supaya dapat menyeleksi masyarakat dan selanjutnya melakukan verifikasi oleh pihak setempat.

Dari hasil observasi yang diperoleh bahwasanya DP3AKB memiliki tenaga pembantu dalam melakukan pencarian serta penelusuran melalui proses klarifikasi dan verifikasi agar bantuan tersebut bisa bermanfaat dan sesuai dengan sasaran yakni keluarga pra sejahtera.<sup>34</sup>

Selanjutnya kesimpulan dari perolehan wawancara dan observasi secara menyeluruh dengan beberapa informan bisa disimpulkan bahwasanya DP3AKB mempunyai peran penting untuk menangani penuntasan kemiskinan pada keluarga pra sejahtera DP3AKB selaku regulator menjalankan tugas serta mengentaskan kemiskinan pada keluarga pra sejahtera di Kota Jember melalui proses pendataan masyarakat serta permasalahan yang dilaksanakan oleh PLKB, sehingga peran DP3AKB maksimal dalam menuntaskan kemiskinan pada keluarga pra sejahtera di Kota Jember. DP3AKB tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya walaupun memiliki tenaga pembantu untuk mendata masyarakat miskin pada keluarga pra sejahtera, melainkan saling mendukung untuk menuntaskan kemiskinan pada keluarga pra sejahtera. Pemerintah terutama DP3AKB membantu masyarakat dengan mendata dan masyarakat yang memperoleh

---

<sup>34</sup> Observasi, 8 Juni 2022.

bantuan tersebut tidak langsung mendapatkannya melainkan melalui proses klarifikasi dan verifikasi agar bantuan tersebut bisa bermanfaat.

## 2. Dinamisator

Pemerintah selaku dinamisator memiliki peranan sebagai pembangkit partisipasi masyarakat jika terdapat permasalahan pada proses pembangunan demi kemajuan dan memelihara dinamika Pembangunan Daerah. Pemerintah selaku dinamisator diharapkan membimbing dan mengarahkan dengan intensif serta efektif untuk masyarakat. Pemerintah berperan untuk menangani keluarga pra sejahtera di Kota Jember melalui pemerian indikator sebagai dinamisator.

Dari indikator dinamisator untuk penanganan keluarga pra sejahtera di Kota Jember terkait peran pemerintah dilakukan wawancara kepada kepala kasubag umum dan kepegawean mengemukakan bahwasanya:

“Dinamisator dari DP3AKB bertugas serta berfungsi untuk menangani masyarakat miskin terutama keluarga pra sejahtera yang ada di Kota Jember, bisa diketahui dari adanya seksi keluarga sejahtera, tetapi tidak hanya sebatas itu, masalah sosial yang ada di DP3AKB tetapi diantaranya ada keluarga pra sejahtera yang harus diberi bimbingan. Salah satu bimbingan yang diberikan yakni melalui agenda seminar pelatihan membuat abon ikan air tawar.”<sup>35</sup>

Dari Keterangan tersebut bisa disimpulkan bahwasanya penanganan selaku dinamisator bertugas dalam menangani masyarakat pra sejahtera di Kota Jember. Bimbingan tersebut diberikan dengan melaksanakan

---

<sup>35</sup> Bpak Yoyok, Kasubag umum dan kepegawean kantor DP3AKB Kabupaten Jember, 09 Mei 2022.

pembinaan kepada keluarga pra sejahtera melalui pelatihan dalam seminar pembuatan abon ikan air tawar salah satunya.

Selanjutnya perolehan wawancara dengan Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana di DP3AKB Kota Jember mengemukakan bahwasanya:

“Pemerintah selaku dinamisator tentu saja memiliki peran dalam mengumpulkan data seluruh masyarakat Yang dilaporkan oleh pihak kelurahan atau pemerintah setempat melalui PLKB, kita cuma menerimanya sehingga kita tahu bahwa di daerah tersebut ada masyarakat yang membutuhkan bantuan dan selanjutnya kita melihat data lalu mencocokkannya baru Selanjutnya turun langsung ke lapangan kemudian diberikan bantuan dengan tepat sasaran. Kalau untuk fokus dinamisator ya juntrungnya kan menuju ke bimbingan tanggal 3 Mei besok ada bimbingan membuat abon dari ikan yang hidup di air tawar kan murah dan mudah didapat mbak.”<sup>36</sup>

Dari Keterangan tersebut bisa disimpulkan bahwasanya pemerintah selaku dinamisator memiliki peran untuk melakukan pendataan seluruh masyarakat sesuai laporan yang diberikan oleh pihak kelurahan maupun pemerintah setempat melalui PLKB. DP3AKB memperoleh laporan dari PLKB terkait masyarakat yang memerlukan bantuan kemudian melakukan pencocokan data dengan survei yang akan dilakukan yang bertujuan supaya bantuan tersebut bisa tepat sasaran. Kemudian turun tangan untuk melakukan bimbingan pelatihan melalu seminar membuat abon ikan air tawar.

Berikutnya perolehan wawancara dengan Koordinator DP3AKB Kecamatan Balung yang mengemukakan bahwasanya:

“Kami sebagai pihak yang melakukan penyuluhan lapangan tentunya menjadi dinamisator pada berbagai hal terutama untukmelakukan

---

<sup>36</sup> Miskaton Keluarga Pra Sejahtera, 01 Mei 2022.

pembinaan dalam berbagai pelatihan agar bisa mengubah taraf hidup keluarga tersebut”<sup>37</sup> (Hasil wawancara dengan KN,).

Dari Keterangan tersebut bisa dipahami bahwasanya selaku penyuluhan lapangan banyak hal yang jadi peranan DP3AKB terutama untuk menuntaskan kemiskinan pada keluarga pra sejahtera. Melaksanakan riset di lapangan agar bisa memperlihatkan besarnya tingkat kategori keluarga pra sejahtera di Kota Jember serta bagaimana cara menanggulangnya melalui evaluasi bantuan yang berlangsung apakah sudah berlangsung dengan baik atau hanya jalan di tempat.

Berikutnya perolehan wawancara dengan masyarakat Kota Jember yang memperoleh bantuan dalam program keluarga pra sejahtera mengemukakan bahwasanya:

“Kelemahan dari bantuan ini yaitu kami diberi pelatihan tapi selanjutnya Kami memperoleh bantuan tapi tidak semuanya mendapatkannya karena banyak yang memerlukan bantuan namun tidak mendapatkannya karena bantuan itu hanya sesuai data yang dimiliki oleh pemerintah sehingga sebagian yang tidak termasuk di data tersebut pastinya tidak dapat bantuan. Lagi pula pelatihan yang dilakukan hanya berlangsung beberapa hari dan selanjutnya tidak didampingi secara rutin.”<sup>38</sup>

Perolehan dari wawancara di atas bisa disimpulkan bahwasanya masyarakat beranggapan bahwasanya kekurangan dari bantuan dari DP3AKB ialah pihak DP3AKB memberi pelatihan hingga selesai selaku syarat agar memperoleh bantuan dari data yang sudah diberikan, sehingga jika tidak menuntaskan pelatihan maka masyarakat yang semestinya

---

<sup>37</sup> Bapak Kusen, Koordinator DP3AKB Kecamatan Balung, 26 April 2022.

<sup>38</sup> Suparti Keluarga Pra Sejahtera, 27 Juni 2022.

memperoleh namun tidak memperolehnya karena syarat tersebut. Masyarakat mengharapkan pemerintah memberi bantuan tetapi tidak mempersulit masyarakat dengan memberi syarat tersebut.

Berikutnya perolehan wawancara dengan masyarakat Kota Jember yang memperoleh bantuan keluar pra sejahtera mengemukakan bahwasanya:

“Kekurangannya itu kita dikasih pelatihan tapi tidak diberikan bantuan tetapi tidak semuanya mendapatkan bantuan itu karena banyak yang butuh bantuan tapi tidak mendapatkannya karena bantuan itu hanya sesuai dengan data yang sudah dilakukan pemerintah, jadinya yang tidak masuk di data pasti tidak dapat bantuan.”<sup>39</sup>

Dari perolehan wawancara di atas bisa disimpulkan bahwasanya bantuan dari pemerintah berlangsung melalui tahap seleksi untuk penerima bantuan yang layak.

Selanjutnya perolehan wawancara di atas diperkuat oleh hasil observasi bahwasanya penanganan sebagai dinamisator bertugas serta berfungsi menangani keluarga pra sejahtera di Kota Jember yang diperlihatkan melalui adanya pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta adanya bimbingan yang diberikan. Bimbingan tersebut berbentuk kegiatan pembinaan. Pembinaan dilakukan disertai dengan memberikan pelatihan usaha pada kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pemerintah selaku dinamisator memiliki peran yakni dalam pelatihan dalam

---

<sup>39</sup> Tumi, Keluarga Pra Sejahtera, 27 Juni 2022.

agenda seminar salah satunya yang akan dilakukan pada tanggal 3 Mei yakni pelatihan seminar membuat abon dari ikan air tawar.<sup>40</sup>

Berikut yakni hasil dokumentasi dari salah satu pelatihan yang diadakan oleh DP3AKB dalam penanggulangan keluarga pra sejahtera :

**Gambar 4.2**  
**Seminar Pelatihan Pembuatan Abon dari Ikan Air Tawar<sup>41</sup>**



Agenda pelatihan pembuatan air tawar tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2023. Keluarga pra sejahtera sangat antusias dalam pelatihan ini dikarenakan mereka sangat penasaran dalam pembuatan abon yang terbuat dari ikan air tawar yang mudah di dapat dan murah.

<sup>40</sup> Observasi, 3 Mei 2022.

<sup>41</sup> Dokumentasi, 3 Mei 2022.

### 3. Fasilitator

Selaku fasilitator maka pemerintah memiliki peran untuk memberi situasi yang kondusif selama berlangsungnya Pembangunan Daerah. Pemerintah memiliki tugas pendampingan melalui pelatihan, pendidikan serta peningkatan keterampilan, Kemudian pada aspek pembiayaan pada masyarakat yang diberdayakan. Pemerintah berkaitan erat dengan penanggulangan keluarga pra sejahtera di Kota Jember yang bisa dilihat dari indikator pemerintah sebagai fasilitator.

Melalui indikator tersebut terdapat beberapa pernyataan dari perolehan wawancara yang dilaksanakan dengan narasumber yakni, Kasubag umum dan kepegawean, kepala koordinasi PLKB Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana ( Kb-Ks), dan Masyarakat Penerima Bantuan.

Dari indikator Fasilitator pada penanganan fakir miskin di kota Jember terkait peran pemerintah, melalui wawancara kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana ( Kb-Ks) mengatakan kepada:

“Kami selaku pemerintah sekaligus fasilitator untuk menangani kemiskinan pada keluarga berencana di Kota Jember tentunya dalam hal ini memfasilitasi dengan mendanai seluruh kegiatan pelatihan yang diadakan oleh DP3AKB, tak hanya itu kami juga mendanai agenda implan gratis dan memberi beberapa bantuan dana untuk sembako kepada keluarga pra sejahtera.”<sup>42</sup>

Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwasanya pemerintah selaku fasilitator berperan secara langsung kepada masyarakat untuk mendanai

---

<sup>42</sup> Bapak Antok, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana ( Kb-Ks), 1 Maret 2022.



semua kegiatan yang dilaksanakan DP3AKB Jember salah satunya mendanai semua kegiatan pelatihan, implant gratis, dan sejumlah uang untuk dirupakan sembako untuk keluarga pra sejahtera Kota Jember.

Berikutnya perolehan wawancara dengan Kasubag umum dan kepegawean di DP3AKB Kota Jember mengemukakan bahwasaya:

“Selaku fasilitator maka pemerintah yang baik tentunya memberi fasilitas sebagai penunjang dari kebijakan penanganan keluarga pra sejahtera. Dengan mendanai semua aktifitas yang berkaitan dengan penanganan keluarga pra sejahtera.”<sup>43</sup>

Dari keterangan di atas bisa dipahami bahwasanya selaku fasilitator DP3AKB tentunya memberi fasilitas berupa pendanaan pelatihan demi pelatihan, uang tunai dan sembako yang bisa memudahkan keluarga pra sejahtera dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Berikutnya perolehan wawancara dengan Koordinator DP3AKB Kecamatan Balung yang berhasil di himpun oleh penulis mengatakan bahwa:

“Berbicara fasilitator tentu saja pemerintah terutama DP3AKB memiliki peran terkait penanganan keluarga pra sejahtera. DP3AKB memiliki peran utama termasuk dalam pendanaan berbagai agenda pelatihan yang telah dilaksanakan.”<sup>44</sup>

Dari wawancara di atas diperkuat dengan hasil observasi bahwasanya DP3AKB selaku fasilitator bertanggung jawab besar melakukan pencairan anggaran untuk kemiskinan pada keluarga pra sejahtera sendiri dikelola tetapi anggaran tersebut sudah tertera dengan perincian pengeluaran pada program yang diberikan untuk masyarakat. Setiap anggaran memiliki

---

<sup>43</sup> Bapak Yoyok, Kasubag umum dan kepegawean kantor DP3AKB, 09 Maret 2022.

<sup>44</sup> Bapak Kusen, Koordinator DP3AKB Kecamatan Balung, 26 April 2022.

porsi tersendiri sehingga DP3AKB memperoleh anggaran sesuai RAB dan tidak lebih atau kurang karena DP3AKB hanya menjalankan program tertentu dengan sasaran untuk menuntaskan keluarga pra sejahtera.<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara dan obsevasi diatas bisa disimpulkan bahwa peran DP3AKB dalam fasilitator yakni mendanai semua aktifitas atau agenda mengenai pelatihan yang dijalankan oleh keluarga pra sejahtera, memberi bantuan sejumlah uang tunai dan sembako.

## 2. Keterlibatan masyarakat pra sejahtera terhadap program DP3AKB

Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak Kusen selaku Koordinator DP3AKB Kecamatan Balung sebagai berikut :

“Mereka sangat antusias sih mbak. Mendapat ilmu baru dan bantuan dari kami.”<sup>46</sup>

Tak hanya pemerintah melainkan masyarakat yang memperoleh bantuan dalam program keluarga pra sejahtera. Berikut yakni hasil wawancaranya :

“Ya saya kira masyarakat yang terdaftar dalam program keluarga pra sejahtera sangat bersemangat tinggi dalam mengikuti program demi program yang kami laksanakan.”<sup>47</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dari warga yang menerima bantuan dari DP3AKB program keluarga pra sejahtera sebagai berikut :

“Ya, saya senang sekali nama saya ternyata masuk dalam catatan pemerintah. Karna saya benar-benar membutuhkannya. Entah dari pelatihan serta bantuan yang akan mereka beri kepada kita.”<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Observasi, 03 Meni 2022.

<sup>46</sup> Bapak Kusen, Koordinator DP3AKB Kecamatan Balung, 03 Mei 2022.

<sup>47</sup> Suparti penerimabantuan pra sejahtera, 03 Mei 2022.

<sup>48</sup> Tumi, penerima bantuan program pra sejahtera, 04 Mei 2022.

“Semangat lah, diberi bantuan kok gak semangat mbak ya aneh namanya. Kami ingin taraf hidup kami meningkat gak gini terus.”<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa masyarakat yang tercatat dalam program pra sejahtera sangat antusias dan senang untuk mengikuti seluruh program yang dijalankan oleh pemerintah karena mereka sangat membutuhkan.

Dari hasil wawancara diatas didukung oleh hasil observasi di lapangan yangmana masyarakat sangat antusias untuk mengikuti pelatihan dengan itu bangku yang disediakan oleh pemerintah penuh dan tak tersisa.<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi diatas diperkuat juga dengan hasil dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti sebagai berikut :

**Gambar 4.3<sup>51</sup>**  
**Pelatihan Pembuatan Abon Ikan Tawar**



<sup>49</sup> Miskaton, penerima bantuan program pra sejahtera, 04 Mei 2022.

<sup>50</sup> Observasi, 03 Mei 2022

<sup>51</sup> Dokumentasi, 03 Mei 2022.

Dari foto diatas bisa disimpulkan bahwa sangat banyak warga yang tercatat sebagai keluarga pra sejahtera ikut dalam seminar.

### **C. Pembahasan Temuan**

Pada pembahasan temuan dalam penelitian ini ditemukan beberapa data yang sesuai dengan fokus penelitian. Pembahasan temuan ini ialah wujud interpretasi dari perolehan yang didapatkan di lapangan kemudian dilakukan analisis Melalui penggunaan teori yang relevan dengan pembahasan. Terdapat peran pemerintah yang maksimal serta mendalam supaya bisa memberdayakan masyarakat, peran pemerintah yang dimaksud oleh Yusuf (2014) ialah:

#### **1. Peran DP3AKB dalam melaksanakan program pemberdayaan keluarga pra sejahtera**

Teori peran mengutarakan bahwasanya peran ialah rangkaian perilaku yang berbeda. Namun apa yang menjadikan perilaku tersebut sesuai dengan sebuah kondisi serta tidak sesuai dengan kondisi lainnya yang relatif bebas pada individu yang melaksanakan peran tersebut.

Sementara Poerwodarminta (1995) Mengemukakan peran ialah sikap yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok pada sebuah kejadian. Maksudnya ialah perangkat tingkah laku yang diinginkan serta dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Menurut KBBI, peran ialah rangkaian yang diinginkan serta dimiliki oleh individu yang memiliki kedudukan di masyarakat.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Poerwodarminta 1995. KBBI. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Peran pemerintah yang maksimal bisa menciptakan masyarakat sehingga peran pemerintah tersebut merupakan yang disampaikan oleh Yusuf (2014) yakni:

a. Pemerintah Sebagai Regulator

Berdasarkan hasil temuan dalam tahap regulator DP3AKB mempunyai peran penting untuk menangani penuntasan kemiskinan pada keluarga pra sejahtera DP3AKB selaku regulator menjalankan tugas serta mengentaskan kemiskinan pada keluarga pra sejahtera di Kota Jember melalui proses pendataan masyarakat serta permasalahan yang dilaksanakan oleh PLKB, sehingga peran DP3AKB maksimal dalam menuntaskan kemiskinan pada keluarga pra sejahtera di Kota Jember. DP3AKB tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya walaupun memiliki tenaga pembantu untuk mendata masyarakat miskin pada keluarga pra sejahtera, melainkan saling mendukung untuk menuntaskan kemiskinan pada keluarga pra sejahtera. Pemerintah terutama DP3AKB membantu masyarakat dengan mendata dan masyarakat yang memperoleh bantuan tersebut tidak langsung mendapatkannya melainkan melalui proses klarifikasi dan verifikasi agar bantuan tersebut bisa bermanfaat.

b. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Berdasarkan hasil temuan dalam tahap dinamisator yakni terdapat pembinaan dan bimbingan melalui penyuluhan seminar-seminar yang dilakukan oleh DP3AKB. Salah satu contoh seminarnya

yakni terdapat pada tanggal 03 Mei 2023, mereka mengadakan seminar penyuluhan dengan Tema pembuatan abon dari ikan air tawar yang sukses membuat para pra keluarga bersemangat dalam mengikuti seminar dengan rasa penasaran yang tinggi.

c. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Berdasarkan hasil temuan DP3AKB selaku fasilitator bertanggung jawab besar melakukan pencairan anggaran untuk kemiskinan pada keluarga pra sejahtera sendiri dikelola tetapi anggaran tersebut sudah tertera dengan perincian pengeluaran pada program yang diberikan untuk masyarakat. Setiap anggaran memiliki porsi tersendiri sehingga DP3AKB memperoleh anggaran sesuai RAB dan tidak lebih atau kurang karena DP3AKB hanya menjalankan program tertentu dengan sasaran untuk menuntaskan keluarga pra sejahtera. peran DP3AKB dalam fasilitator yakni mendanai semua aktifitas atau agenda mengenai pelatihan yang dijalankan oleh keluarga pra sejahtera, memberi bantuan sejumlah uang tunai dan sembako.

**2. Keterlibatan masyarakat pra sejahtera terhadap program DP3AKB**

Keluarga pra sejahtera adalah suatu keluarga yang masih hidup dalam tingkat yang serba kekurangan. Kekurangan dalam berbagai aspek kehidupan yang layak. Keluarga pra sejahtera pada umumnya tidak hanya kurang mampu dalam tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan, tetapi

sekaligus juga kekurangan dalam bidang finansial atau materi dan harta benda.<sup>53</sup>

Keluarga Prasejahtera merupakan keluarga yang orangtuanya masih belum mampu memenuhi kebutuhan pokok sepenuhnya dalam keluarga. Dalam keluarga prasejahtera tidak ada suatu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap anggota keluarganya. Sehingga dari bentuk keluarga tersebut akan menghasilkan suatu focus untuk memulihkan keadaan perekonomian saja, tanpa mementingkan pendidikan antar keluarga.<sup>54</sup>

Ada beberapa kriteria keluarga prasejahtera, yaitu:

- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing.
- b. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih.
- c. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah. Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> perorang.
- d. Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern dengan menggunakan kartu BPJS.
- e. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambo/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester

---

<sup>53</sup> M. Dian Antariksa, dkk. "Peranan Orang Tua Keluarga Pra Sejahtera dalam Pendidikan Anak", (Bandar Lampung : FKIP Unila, 2018), hlm. 3

<sup>54</sup> Reiza Nuary Asih Hartono. "Peran Orangtua Dalam Pendidikan Karakter Anak Pada Keluarga Prasejahtera", Skripsi, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), hlm. 7.

- f. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- perbulan pendidikan tertinggi kepala rumah tangga yaitu tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD.<sup>55</sup>

Mereka di kategorikan sebagai Keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator di atas. Keluarga pra sejahtera di Jember rata-rata masih berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Rumah yang digunakan juga masih sangat sempit bahkan masih pada kualitas yang rendah dengan dinding rumah kayu/ bambu lantai rumah yang masih tanah dan atap yang berlubang sehingga mengakibatkan kebocoran. Ada juga yang dengan kondisi anak yang sangat banyak menyebabkan banyak dari mereka tidak bersekolah.

Berdasarkan hasil temuan para penerima bantuan keluarga pra sejahtera sangat antusias dalam melakukan dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah DP3AKB. Salah satunya terlihat pada antusiasisme para keluarga pra sejahtera dalam mengikuti pelatihan seminar pembuatan abon dari ikan air tawar.

Bisa disimpulkan bahwa keterlibatan para penerima bantuan keluarga pra sejahtera sangat bagus dalam mengikuti semua program

---

<sup>55</sup> U'thiya Ni'matur Robiah. "Pola Asuh Orangtua Dalam Membina Akhlaq Anak Usia Dini Sekolah Dasar Pada Keluarga Prasejahtera Di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak", Skripsi, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2018, hlm. 59.



pelatihan yang diadakan oleh DP3AKB. ;Mereka sangat antusias dalam melakukan dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah DP3AKB. Salah satunya terlihat pada antusiasisme para keluarga pra sejahtera dalam mengikuti pelatihan seminar pembuatan abon dari ikan air tawar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari perolehan penelitian yang di dilaksanakan di Kota Jember terkait Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Penanganan keluarga pra sejahtera di Kota Jember. Sehingga penulis bisa memberi beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam penanganan keluarga pra sejahtera yakni dengan peran regulator berupa pendataan valid mengenai masyarakat pra sejahtera dibantu oleh tenaga pembantu, peran dinamisator yakni dengan melakukan beberapa pelatihan khusus berupa seminar salah satunya yakni seminar pelatihan pembuatan abon ikan air tawar, sebagai fasilitator yakni dengan membiayai beberapa agenda pelatihan, implan gratis, dan penyaluran dan berupa uang dan sembako.
2. Keterlibatan para penerima bantuan keluarga pra sejahtera sangat bagus dalam mengikuti semua program pelatihan yang diadakan oleh DP3AKB. ;Mereka sangat antusias dalam melakukan dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah DP3AKB. Salah satunya terlihat pada antusiasisme para keluarga pra sejahtera dalam mengikuti pelatihan seminar pembuatan abon dari ikan air tawar

## B. Saran

Dari perolehan penelitian yang dilaksanakan di Kota Jember terkait Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Penanganan keluarga pra sejahtera di Kota Jember. Oleh sebab itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah terutama DP3AKB melaksanakan pendataan ulang serta memperbaiki metode pendataan supaya pendataan keluarga pra sejahtera Kota Jember tepat sasaran.
2. Selain DP3AKN tentunya bagi instansi lain misalnya Kelurahan dan Kecamatan kota Jember, harus sungguh-sungguh berpartisipasi untuk menetapkan kategori keluarga pra sejahtera dan tidak mendahulukan orang terdekat seperti keluarga, kerabat atau yang lain sehingga bisa menghalangi penuntasan kemiskinan pada keluarga pra sejahtera di kota Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

- . *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UIN KHAS Jember , 2021.
- . Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di [kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembelajaran](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembelajaran). Diakses 11 Mei 2022
- Adimihardja, K., dan Hikmat, H., 2004. *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Al-qur'an Al-Karim. Al-qur'an Terjemah, Saudi : Khatim Al-Haramain, 2010
- Aziz dan Hartonoya. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia* . Bogo, 2009..
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat . *Statistik Indonesia Tahun 2010*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik, 2010
- Baharoglu, Deniz and Christine Kessides. *Urban Poverty in World Bank, PRSP Sourcebook*, Washington DC, : World Bank, 2016.
- Bunga Nur Mawaddah Nasution, Skripsi *Pemberdayaan Masyarakat : Studi Kasus Kegiatan Bank Sampah di Perumahan Bukit Pamulang Indah RW 09 DAN 13 Tangerang Selatan*.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Payakumbuh. *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Jember: DP3AP2KB Kabupaten Jember, 2015
- Hartanto. *Metodologi Pemberdayaan Perempuan*. Bogor : IPB Pres, 2004.
- Indikator Kinerja Pemda oleh Bappeda DIY <https://portaljember.pikiran> pada tanggal (14 April 2021, 07:56 WIB).
- JimIfe, Frank Tesoriero. *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Juliandi, Azuar dan Irfan. *Metedologi penelitian kuantitatif* .Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013.
- Madikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* .Bandung : Alfabeta, 2020

Maipita,indra. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Medan:UPPS TIM YKPN, 2014

Marito Sipahuta. *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir*, 2019

Melani Leimena *Pemberdayaan Perempuan* Suharli Anggota DP, 2020

*Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyarah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)*. "Sumatera Utara Universitas Islam Negeri Sumatera Utara".

Mukti. *Pengertian Keluarga Berencana*. Jakarta: Sireger,2016

Noor, Munawar, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume 1, No 2, (Juli 2011)

Noor, Munawar. "Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah* Vo.1 No.2 (2011): 88-89.

Reza. Skripsi, "*Efektivitas Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) Terhadap Rumah Tangga Miskin diKecamatan BalungKabupaten Jember (Perspektif Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*, 2017)

Sidir, Umar dan Choiri, Moh. Miftachul. *Metode PenelitianKualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV.Nata Karya, 2019.

Siti Nurjanah 2020 ,Skripsi:"*Strategi Pemanfaatan Lahan Kosong Untuk Taman Mahkota Dalam Meningkatkan Pendapatan Warga*"(Lampung Utara: IAIN Metro,2020), hal1-2

SMERU (Suhartodkk, tahun 2004) dalam (Sjafari,tahun 2014:16)

SriIryani, *Penanganan Fakir Miskin DiDesa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012*. Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2015.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung: CV : Alfabeta, 2012.

Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosa*, 2001.

Syamsul Dwi Maarif, "Mengenal Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli, 2021" (<https://tirto.id/mengenal-teori-pemberdayaan-masyarakat-menurut-para-ahli-gbyu>, Diakses pada tanggal 29 Maret 2021

Tim Penyusun, *Pedoman Karya ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2017

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2011

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkembangan Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak Nomer 23 Pasal 1 Tahun 2002

Undang-undang RI No.13 Tahun 2011 Tentang penanganan fakir miskin

Yusuf, Iyas. *Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*, 2014. Diakses tanggal, 25 Juli, 2020. <http://www.iyasyusuf.asia/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintah-dalam-html>.

Zakiah. *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita dan Putri Al-Irsyad Surabaya No XVII*, Juni 2010

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vira Mufarida

NIM : D20182023

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Juni 2023  
Saya yang menyatakan




Vira Mufarida  
NIM D20182023

## MATRIK PENELITIAN







Judul	Fokus Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Jember	<p>A. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai Regulator dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Jember?</p> <p>B. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai</p>	<p>1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</p> <p>2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</p> <p>3. Fakir Miskin</p>	<p>a. Pengertian Peran</p> <p>b. Pengertian Pemberdayaan Perempuan</p> <p>c. Pengertian Pemberdayaan Perempuan</p> <p>d. Peluang pemberdayaan perempuan</p> <p>e. Pengertian Perlindungan Anak</p> <p>f. Pengertian Keluarga Berencana</p> <p>g. Pengertian Fakir Miskin</p> <p>h. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan</p> <p>I. Visi dan</p>	<p>1. Indeks pemberdayaan</p> <p>2. Persentase penduduk miskin</p> <p>3. Mendorong pengembangan profesi perempuan</p> <p>4. Memberi beragam keterampilan bagi fakir miskin</p> <p>5. Indeks pemberdayaan Gender (IDG)</p> <p>6. Persentase penduduk miskin dengan program penanggulangan kemiskinan</p> <p>7. Penyandang Masalah Kesejahteraan</p>	<p>1. Kasubag umum dan kepegawean kantor DP3AKB Kabupaten Jember.</p> <p>2. Staf Dinas Bidang Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana (Kb-Ks).</p> <p>3. Koordinator DP3AKB Kecamatan Balung</p> <p>4. Masyarakat yang menerima program dari pemerintah</p>	<p>1. Pendekatan dan jenis penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.</p> <p>2. lokasi penelitian: Kantor DP3AKB Jember dan Kantor PLKB Balung</p> <p>3. Subyek Penelitian: Kasubag umum dan kepegawean kantor DP3AKB Kabupaten Jember, Staf Dinas Bidang Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana (Kb-Ks), Koordinator DP3AKB Kecamatan Balung, Masyarakat yang menerima program dari</p>







	<p>Dinamisator dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Jember? C. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai fasilitator dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Jember?</p>		<p>Misi DP3AKB</p>	<p>Sosial (PMKS) yang mendapat Pembinaan</p>		<p>pemerintah. 4. Pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi . 5. Analisis data: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan . 6. Keabsahan data: penelitian ini menggunakan triangulasi 7. Tahap-tahap penelitian : pra lapangan, pelaksanaan penelitian, tahap penyelesaian .</p>
--	---	--	--------------------	--	--	---

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI

**Nama** : Vira Mufarida  
**NIM** : D20182023  
**Prodi/Fakultas** : Pengembangan Masyarakat Islam  
**Lokasi Penelitian** : Kantor DP3AKB Jember, PLKB Kecamatan Balung  
**Judul** : " Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Jember"  
**Dosen Pembimbing** : Dr. Imam Turmudi, S.Pd., M.M.

No	Hari/Tanggal	Kegiatan Penelitian	Narasumber	Jabatan	TTD
1.	Senin,21/02/22	Menyerahkan surat izin penelitian ke Kantor DP3AKB	Mahasiswi PKL	Magang	
2.	Selasa,22/02/22	Menyerahkan surat izin penelitian ke Kantor DP3AKB	Bapak Yoyok	Kasubag umum dan kepegawean	
3.	Selasa,01/03/22	Wawancara dan dokumentasi	Bapak Antok	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana ( Kb-Ks).	
5.	Rabu,09/03/22	Wawancara dan dokumentasi	Bapak Yoyok	Kasubag.umum dan kepegawaian	
6.	Senin,18/04/22	- Menyerahkan surat izin penelitian ke Kantor PLKB Balung	- Mas Gigih	- Asisten kepala koordinasi Petugas lapangan keluarga berencana ( PLKB)	
7.	Senin,26/04/22	Wawancara dan dokumentasi	Bapak Kusen	Kepala koordinasi Petugas lapangan keluarga	

				berencana ( PLKB)	
8.	Senin,16/05/22	Wawancara dan dokumentasi	Ibu Musrifah	Wakil kepala koordinasi Petugas lapangan keluarga berencana ( PLKB)	
9.	Rabu,08/06/22	Wawancara dan dokumentasi	Ibu Suparti	Masyarakat penerima bantuan	
10.	Senin,27/06/22	Wawancara dan dokumentasi	Ibu Tumi	Masyarakat penerima bantuan	
11.	Jum'at,15/07/22	Wawancara dan dokumentasi	Bapak Miskatun	Masyarakat penerima bantuan	

Jember, 10 Oktober 2022  
Kepala Kantor PLKB



**KUSEN SH.**  
NIP: 197005151990031007

K

)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550  
email : [fakultasdakwah@uinkhas.ac.id](mailto:fakultasdakwah@uinkhas.ac.id) website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B.3383 /Un.22/6.a/PP.00.9/ 09 /2023 19 September 2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Kepala Kantor PLKB Balung

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Vira Mufarida  
NIM : D20182023  
Fakultas : Dakwah  
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama  $\pm$  30 hari di lembaga yang Bapak/lbu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Jember"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/lbu, kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**



Wakil Dekan Bidang Akademik

Siti Raudhatul Jannah





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BALUNG**  
Alamat : Jl Rambipuji No. 126 Balung

SURAT KETERANGAN AKHIR PENELITIAN

No : 007/ 06 / 35.09.10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a : K U S E N. S H  
N I P : 197005151990031007  
Jabatan : Koordinator DP3AKB Kec. Balung

Menerangkan bahwa,

N a m a : VIRA MUFARIDA  
N I M : D20182023  
P r o d i : Pengembangan Masyarakat Islam  
Jenjang : S1  
Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan  
Keluarga Berencana Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten  
Jember

Telah melaksanakan penelitian di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Balung selama 1 ( satu) bulan dimulai dari  
Tanggal 18 April 2022 dan berakhir samapai dengan tanggal 18 Mei 2022

Demikian surat Keterangan ini saya buat untuk digunakan sebagai mana mestinya

Jember, 27 September 2023  
Koordinator DP3AKB Kec. Balung

K U S E N. S H  
NIP: 197005151990031007

K

IQ

## PEDOMAN PENELITIAN

### A. Pedoman Penelitian

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai Regulator dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai Dinamisator dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai fasilitator dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Jember?

### B. Pedoman Observasi

1. Observasi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai Regulator dalam penanganan fakir miskin
2. Observasi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai Dinamisator dalam penanganan fakir miskin
3. Observasi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai fasilitator dalam penanganan fakir miskin

### C. Pedoman Dokumentasi

1. Letak Geografis Kabupaten Jember
2. Profil Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

3. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
5. Foto-foto kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam penanganan fakir miskin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DOKUMENTASI



Foto depan Dinas DP3AKB Jember



Foto kantor PLKB Kecamatan Balung





Mencari informasi kepada Kepala PLKB Kecamatan Balung ( Bpk Kusen)



Mencari data kepada Kepala PLKB Kecamatan Balung ( Bpk Kusen)



Foto diambil saat memperkenalkan diri kepada pegawai Dinas DP3AKB Jember



UNIVERSITAS  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



UNIVERSITY OF  
KIAI HAJI  
SIDIQ



Pemberian materi mengenai PIK-R di Pondok Pesantren Al-Mubarak



Pemberian Materi mengenai PIK-R di Mts Wahid Khasim



Sambutan Ibu bupati di acara pasar murah yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat



Pelatihan membuat abon ikan air tawar yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat



Mendata masyarakat yang akan mendapatkan program dari pemerintah



Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat lansia

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Mencari data masyarakat yang sudah menerima bantuan di kantor Dinas DP3AKB Jember



Mencatat masyarakat yang sudah menerima bantuan di kator PLKB Kecamatan Balung

## BIODATA



Nama : Vira Mufarida  
NIM : D20182023  
TTL : Jember, 12 September 1999  
Alamat rumah : Dusun Krajan Tengah Desa Gumelar  
Kecamatan Balung Kabupaten Jember  
Nama Ayah : Alm. Muhammad Joko  
Nama Ibu : Vitria  
No HP : 082146597960  
Email : viramufarida99@gmail.com  
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah

### **Riwayat Pendidikan :**

- 1) SDN Gumelar 03
- 2) MTs Wahid Hasyim Balung
- 3) MA Wahid Hasyim Balung
- 4) PP. Darul Istiqomah Bondowoso
- 5) UIN KHAS JEMBER

### **Pengalaman Organisasi :**

- 1) Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Anggota
- 2) *Institute of Culture And Islamic Studies* ( ICIS) divisi Bahasa Arab Anggota